

BAB IV

ANALISIS WACANA PEMBERITAAN PENGGUNAAN JILBAB BAGI

POLISI WANITA

Penulis menggunakan analisis wacana untuk menganalisis teks berita penelitian. Analisis wacana merupakan suatu cara atau metode untuk mengkaji wacana yang terdapat atau terkandung dalam pesan-pesan komunikasi, baik secara tekstual maupun kontekstual (Pawito, 2007: 170). Penulis menggunakan analisis wacana model Teun A van Dijk dalam penelitian ini. Van Dijk menggambarkan wacana ke dalam tiga dimensi, yaitu teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. *Pertama*, dimensi teks, van Dijk melihatnya sebagai suatu bangunan yang terdiri atas tiga struktur saling mendukung dan di dalamnya terdapat elemen-elemen lebih kecil. *Kedua*, dimensi konteks sosial, mempelajari bangunan wacana yang berkembang dalam masyarakat mengenai suatu masalah. *Ketiga*, dimensi kognisi sosial, mempelajari proses produksi teks berita yang melibatkan kognisi individu wartawan (Eriyanto, 2001: 224).

Terdapat enam berita yang penulis analisis dalam bab ini. Keenam berita tersebut terbagi dalam tiga kategori, *pertama*, belum mengizinkan penggunaan jilbab, meliputi berita tanggal 5 dan 16 Juni 2013. *Kedua*, mengizinkan penggunaan jilbab, meliputi berita tanggal 20 dan 21 November 2013. *Ketiga*, menunda penggunaan jilbab bagi polwan, meliputi berita tanggal 30 November dan 10 Desember 2013.

4.1. Analisis Teks

4.1.1. Berita tanggal 5 Juni 2013 berjudul Polwan Minta Izin Berjilbab

a. Tematik

Elemen tematik mengamati teks dari topik yang diangkat dalam berita. Topik menunjukkan inti informasi dalam berita, hal tersebut dapat dilihat dari *lead* (teras berita), yaitu:

Beberapa waktu lalu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendapatkan pengaduan dari salah seorang perempuan anggota kepolisian yang tak diperbolehkan mengenakan jilbab. Laporan tersebut pun segera ditanggapi.

Topik yang ingin disampaikan dalam berita yakni pengaduan seorang polisi wanita (polwan) yang tidak diperbolehkan mengenakan jilbab kepada MUI. Wartawan menggunakan kata perempuan yang mengandung konotasi untuk menunjuk pada polwan. Wartawan menginginkan publik mengetahui bahwa polwan tidak mendapat izin untuk memakai jilbab saat bertugas. Tujuannya agar pihak yang berkompeten seperti MUI, DPR, dan Polri segera menanggapi hal itu.

Hal ini penting untuk diperhatikan karena pada kasus pelarangan penggunaan jilbab siswi sekolah negeri pada tahun 1980-an sudah menemukan solusi. Berupa penyempurnaan peraturan seragam sekolah dan memasukkan seragam jilbab dalam SK 100/C/Kep/D/1991, setelah terjadi pembicaraan intensif antara MUI, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, serta dukungan dari berbagai pihak (Syamsudini, diakses 9 Juni 2013). Kasus tersebut menguatkan bahwa jilbab menjadi suatu keharusan yang dijamin

dalam surat keputusan dan konstitusi. Republika seolah berharap polwan akan mendapat izin berjilbab jika berbagai pihak membantu memperjuangkan hal tersebut, seperti siswi sekolah negeri saat itu.

b. Skematik

Skematik merupakan strategi wartawan untuk mendukung topik yang ingin disampaikan, dengan memberi penekanan bagian yang didahulukan lalu mana untuk selanjutnya. Susunan tersebut bisa menunjukkan bagian penting dan kurang penting, seperti berikut:

Republika mengawali berita berjudul Polwan Minta Izin Berjilbab, dengan mengatakan MUI mendapatkan pengaduan dari polwan yang tidak diperbolehkan mengenakan jilbab. Selanjutnya, Republika menuliskan pendapat Wakil Sekretaris Jenderal MUI Tengku Zulkarnaen, bahwa alasan melarang polwan memakai jilbab bertolak belakang dengan Undang-undang Dasar (UUD) 1945.

Pada pertengahan berita, Zulkarnaen terkesan mengancam, jika kepolisian tidak mengeluarkan peraturan perizinan polwan berjilbab, maka jalan yang ditempuh yaitu datang ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membatalkan pelarangan. Dilanjutkan pendapat polwan Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng) yang mengadu kepada Ustaz Wahfiudin tentang keinginannya berjilbab saat berdinis. Ustaz Wahfiudin juga terlihat mendukung keinginan polwan. Selanjutnya, wartawan menjelaskan, polwan Jateng pernah menulis surat permintaan izin berjilbab, namun tidak dikabulkan, bahkan keluar

peraturan yang menegaskan polwan berjilbab hanya diperbolehkan di Polda Aceh. Pada akhir berita, wartawan menuliskan pendapat anggota DPR dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Zainuddin, yang berjanji menindaklanjuti keinginan polwan mengenakan jilbab.

Republika mengawali berita dengan menuliskan hal-hal yang dilanggar Polri jika melarang penggunaan jilbab bagi polwan, baru dilanjutkan kronologi dan pendapat polwan yang menginginkan berjilbab. Susunan tersebut terkesan membangun citra negatif kepolisian sebagai instansi penegak hukum, yakni jika tidak mengizinkan polwan berjilbab, maka Polri akan melanggar UUD 1945. Dipertegas dengan pemilihan narasumber kontra terhadap tidak diizinkannya polwan berjilbab. Seperti pemilihan pendapat MUI, diletakkan pada awal berita dan diberi porsi banyak, sehingga mengesankan tidak perlu ada pelarangan karena lembaga pemberi fatwa permasalahan keagamaan sudah menegaskan Polri akan melanggar hak menjalankan ibadah.

c. Semantik

Semantik mempelajari makna apa yang ditekankan dalam teks, terdapat beberapa elemen elemen yang diamati, yaitu latar, detil, maksud, dan pra anggapan.

c.1. Latar

Latar dapat menjadi alasan pembenaran gagasan yang diajukan suatu teks, dipakai untuk menyediakan latar belakang akan dibawa kemana makna teks tersebut. Seperti pada kalimat:

Sejumlah polwan yang bertugas di Polda Jateng sudah pernah menulis surat kepada Kapolri agar mendapat izin mengenakan jilbab, tetapi tidak dikabulkan. Bahkan, setelah itu keluar surat edaran Kapolri yang menegaskan bahwa yang boleh berseragam Polri dengan mengenakan jilbab hanya polwan yang bertugas di Polda NAD.

Kata sudah pernah, pada awal kalimat menjadi titik berat yang ingin disampaikan wartawan. Dilanjutkan penggunaan koherensi atau kepaduan makna, pada kata tetapi, yang menyatakan pertentangan. Berfungsi menambah kejelasan suatu pemaparan, yaitu surat permohonan izin berjilbab tidak dikabulkan kapolri. Wartawan juga memberi penekanan menggunakan kata hubung bahkan. Bermaksud menunjukkan akibat dari permohonan izin berjilbab yaitu keluar surat edaran kapolri yang menegaskan seragam jilbab Polri hanya untuk polwan di Polda Aceh. Alasan tersebut menjadi latar belakang polwan Jateng mengadu mengenai tidak diizinkannya berjilbab.

Republika ingin mengatakan bahwa sejumlah polwan sudah berusaha meminta izin berjilbab pada kapolri, akan tetapi hasilnya tidak sesuai harapan. Akan lebih efektif jika masyarakat dari berbagai kalangan ikut bertindak dan mendukung perizinan pemakaian jilbab bagi polwan.

c.2. Detil

Elemen wacana detil berhubungan dengan kontrol informasi yang ditampilkan wartawan dalam berita, diuraikan secara panjang atau tidak. Detil berita yaitu:

Dalam pasal 29 UUD 1945, tersirat adanya jaminan kebebasan untuk menjalankan syariat sesuai kepercayaan agamanya. Dalam Islam, mengenakan jilbab bagi perempuan hukumnya wajib. “Seandainya Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melakukan pelarangan pemakaian jilbab, tentu ini melanggar UUD 1945.”

Penggunaan kata jaminan dalam kutipan tersebut menunjukkan telah ada perlindungan hak menjalankan ibadah dalam UUD 1945, dasar dari semua undang-undang. Kata syariat dan dasar hukum jilbab terkesan dipengaruhi ideologi keislaman Republika. Republika menampilkan pendapat secara detail, dimulai dari pasal dan isi undang-undang yang menjamin kebebasan menjalankan ibadah, hingga hukum jilbab dalam Islam bagi wanita. Strategi tersebut membangun wacana bahwa sebagai lembaga penegak hukum, Polri telah mengabaikan jaminan hak dalam UUD 1945, bahkan melanggar konstitusi apabila tidak mengizinkan polwan berjilbab.

c.3. Maksud

Elemen maksud menunjukkan bagaimana secara implisit dan eksplisit wartawan menggunakan praktik bahasa tertentu untuk menonjolkan kebenaran dan menyembunyikan kebenaran tersebut. Perhatikan paragraf berikut:

Cukup banyak anggota polwan yang ingin berseragam dengan memakai jilbab. Tapi sayangnya, keinginan para polwan tersebut tampaknya terbentur dengan belum adanya peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) yang mengatur tentang penggunaan seragam polwan berjilbab di luar Kepolisian Daerah (Polda) Nangroe Aceh Darussalam (NAD).

Republika menjelaskan secara implisit mengenai jumlah polwan yang ingin berjilbab, hanya menuliskan cukup banyak. Selanjutnya, secara eksplisit menuliskan alasan terhalangnya keinginan polwan menggunakan jilbab saat berdinastis karena belum ada peraturan kapolri tentang penggunaan seragam jilbab polwan di luar Polda Aceh. Penulisan tersebut terkesan memberi maksud tidak sedikit polwan yang ingin berjilbab, namun terhalang dengan belum adanya peraturan seragam jilbab di luar polda Aceh. Paragraf tersebut memperlihatkan ekspresi kecewa Republika terhadap Polri, dan terkesan menunggu langkah Polri mengeluarkan peraturan seragam jilbab polwan.

c.4. Pra anggapan

Elemen wacana pra anggapan merupakan upaya mendukung pendapat dengan memberikan premis yang dapat dipercaya kebenarannya. Pra anggapan berita ini yaitu:

“Seandainya Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melakukan pelarangan pemakaian jilbab, tentu ini melanggar UUD 1945.”

Republika menggunakan kata seandainya untuk memandang peristiwa yang mungkin terjadi. Penempatan kata seandainya, pada awal kalimat terkesan menghakimi jika pengandaian terjadi. Republika menekankan pendapat Zulkarnaen pada kalimat, “tentu ini melanggar UUD 1945” jika Polri melarang pemakaian jilbab bagi polwan. Republika terkesan

memperingatkan Polri dan menunjukkan akibat dari pelarangan pemakaian jilbab polwan.

d. Sintaksis

Sintaksis mempelajari bagaimana pendapat narasumber ditampilkan dalam berita. Elemen yang diamati sintaksis, meliputi kata ganti, koherensi, dan bentuk kalimat.

d.1. Kata Ganti

Elemen kata ganti digunakan untuk menunjukkan di mana posisi seseorang dalam wacana atau berita. Lihat kalimat berikut:

“Kami akan bicarakan persoalan ini secepatnya dengan Kapolri,”

Kata ganti kami menunjukkan orang pertama jamak yang menyatakan kelompok di luar pembaca, sehingga menumbuhkan jarak antara pembaca dan narasumber berita. Kata ganti kami dalam berita tersebut, mewakili Zainuddin dan anggota DPR dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), partai politik berbasis Islam. Pemilihan tersebut tentunya mengandung maksud, Republika memandang DPR sebagai dewan yang berwenang membuat undang-undang. Setidaknya, menyampaikan permasalahan mengenai tidak diizinkannya polwan berjilbab kepadanya, akan membawa perubahan, ditambah dengan PKS sebagai partai Islam, tentu aspirasi polwan akan mendapat respon serius.

d.2. Koherensi

Koherensi merupakan pertalian antarkata, proposisi atau kalimat, yang ditampilkan dalam bentuk sebab akibat, bisa juga sebagai penjelas. Koherensi berita ini yaitu:

Sejumlah polwan yang bertugas di Polda Jateng sudah pernah menulis surat kepada Kapolri agar mendapat izin mengenakan jilbab, tetapi tidak dikabulkan.

Republika menggunakan koherensi pertentangan dengan kata penanda tetapi, untuk memperjelas pemaparan. Kalimat kedua menduduki posisi lebih penting daripada yang pertama Terdapat penekanan yang ingin diperlihatkan Republika, yaitu Kapolri tidak mengabulkan keinginan polwan Polda Jateng untuk berjilbab. Kalimat tersebut menggambarkan usaha polwan yang belum mendapatkan hasil. Republika terkesan ingin menunjukkan usaha tersebut kepada publik, dan mengharapkan dukungan agar polwan mendapat izin berjilbab.

d.3. Bentuk Kalimat

Bentuk kalimat menentukan apakah subjek diekspersikan secara eksplisit atau implisit dalam teks berita. Republika menggunakan kalimat aktif untuk menuliskan kalimat berikut:

Seorang polwan yang pernah bertugas di jajaran Polda Jawa Tengah (Jateng) sempat mengadu kepada Ustaz Wahfiudin tentang keinginannya mengenakan jilbab.

Kalimat aktif memberi penekanan pada siapa yang melakukan. Pada kalimat tersebut, wartawan menggunakan kata

mengadu, dengan menjelaskan secara eksplisit bahwa polwan menyampaikan keinginannya mengenakan jilbab kepada ustaz. Subjek dalam kalimat tersebut adalah polwan yang mengadukan keinginannya berjilbab.

e. Stilistik

Stilistik mempelajari pilihan kata apa yang dipakai dalam teks. Elemen yang diamati adalah leksikon, mengenai pemilihan kata atas berbagai kemungkinan kata yang tersedia. Pada berita ini leksikon terlihat dalam kalimat sebagai berikut:

Menurut Wakil Sekretaris Jenderal MUI KH Tengku Zulkarnaen, alasan yang dikemukakan dalam melarang perempuan yang berprofesi menjadi polisi untuk memakai jilbab bertolak belakang dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Wartawan Republika memilih kata “melarang” untuk menuliskan pendapat Zulkarnaen. Kata lain yang memiliki makna hampir sama dengan melarang, yaitu menghalangi, membatasi, tidak memperbolehkan. Kata melarang, menggambarkan terdapat pihak yang tidak memperbolehkan penggunaan jilbab bagi polwan, dalam hal ini pihak yang dimaksud adalah Polri. Polri terkesan mengabaikan hak menjalankan ibadah sesuai agama, yang dilindungi dalam UUD 1945, dengan tidak memperbolehkan polwan berjilbab saat bertugas.

f. Retoris

Retoris berhubungan mengenai bagaimana dan dengan cara apa penekanan dilakukan dalam teks. Elemen yang diamati, yaitu grafis, metafora, dan ekspresi.

f.1. Grafis

Grafis digunakan untuk memeriksa apa yang ditonjolkan oleh seseorang dalam teks.



Republika menaruh perhatian besar pada berita berjudul Polwan Minta Izin Berjilbab, dengan menonjolkan kutipan wawancara dari anggota DPR fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Zainuddin. Kutipan tersebut ditulis dalam bentuk *capture* dengan warna latar hitam, tulisan putih, dan berbentuk lingkaran sehingga terlihat menonjol. Warna hitam menyimbolkan kekuasaan, putih melambangkan harapan, sedangkan lingkaran menggambarkan kesatuan utuh. Maksud dari gambar tersebut, yaitu Republika, polwan, dan narasumber berharap agar DPR serta kapolri, selaku pihak yang berkuasa, segera menangani permasalahan penggunaan jilbab polwan.

f.2. Metafora

Metafora digunakan sebagai ornamen dari buku, bisa disampaikan lewat kiasan, ungkapan sehari-hari, pepatah, sebagai alasan pembenar atas pendapat tertentu kepada publik. Metafora berita ini terlihat pada kalimat:

“Sudah lebih dari tiga tahun hati nurani saya menjerit karena sepulang dari menunaikan ibadah haji”

Sekilas, kalimat tersebut menggambarkan hati nurani yang menjerit, seperti mulut manusia. Makna yang dimaksud dalam kalimat yakni rasa ingin melawan atau memberontak terhadap peraturan Polri yang tidak memperbolehkan polwan berjilbab. Polwan tersebut ingin mengenakan jilbab semenjak pulang menunaikan ibadah haji, untuk melengkapi ketaatan terhadap perintah agama Islam.

f.3. Ekspresi

Elemen ekspresi bertujuan memeriksa apa yang ditekankan oleh seseorang dalam teks. Berikut ekspresi dalam berita:

Di Aceh, kata Tengku, polwan diwajibkan mengenakan jilbab. Ia pun menyayangkan mengapa hal itu hanya boleh di Aceh, bukan di seluruh wilayah Indonesia. “Jika alasannya kebijakan otonomi khusus, mengapa kebijakan ini tidak bisa diperlebar pada tingkat nasional?” ujarnya.

Paragraf tersebut menunjukkan ekspresi kecewa atau penyesalan Zulkarnaen terhadap kebijakan seragam jilbab polwan, dengan mengatakan, “Jika alasannya kebijakan otonomi khusus, mengapa kebijakan ini tidak bisa diperlebar pada tingkat nasional?” Zulkarnaen menunjukkan kekurangpuasan terhadap kebijakan perizinan berjilbab hanya diterapkan di Polda Aceh, bukan di seluruh Indonesia. Republika memandang permasalahan tersebut sebagai persoalan Nasional, karena masyarakat Indonesia mayoritas Muslim, sehingga pemakaian jilbab harus diizinkan.

4.1.2. Berita tanggal 16 Juni 2013 berjudul Pimpinan Polri tak Berhak Larang Polwan Berjilbab

a. Tematik

Topik dalam berita ini tentang tidak ada alasan untuk melarang polwan mengenakan jilbab, dengan mengambil *lead*:

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan syariat Islam mewajibkan kepada setiap perempuan untuk menutup aurat. Karena itu, kata Wakil Sekretaris Jenderal MUI Amir Syah, tidak ada alasan bagi polwan untuk tidak berjilbab. “Dan pimpinan polisi tidak ada hak untuk melarang polwan berjilbab,” katanya kepada Republika, di Jakarta, Sabtu (15/6).

Wartawan Republika menuliskan sikap MUI yang menegaskan hukum menutup aurat dalam Islam. Dilanjutkan kata penghubung antarkalimat, menyatakan akibat yang seharusnya dilakukan. Republika menggunakan sudut pandang keagamaan dalam menuliskan *lead* berita. Mengesankan tidak perlu ada pelarangan karena lembaga pemberi fatwa permasalahan keagamaan telah menegaskan kewajiban wanita menutup aurat, termasuk bagi polwan. Al quran surat Al ahzab ayat 59 juga menjelaskan perintah menggunakan jilbab, agar wanita terhormat tidak mendapat gangguan dari laki-laki jahil.

b. Skematik

Judul berita yang dipilih Republika yaitu Pimpinan Polri tak Berhak Larang Polwan Berjilbab. Sudut pandang berita mengenai jilbab bisa menyesuaikan pola pakaian dinas. Paragraf pertama diawali dengan sikap MUI yang menegaskan syariat Islam mewajibkan perempuan menutup aurat. Landasan tersebut menjadikan

Wakil Sekretaris Jenderal MUI Amir Syah, untuk mengatakan pimpinan Polri tidak berhak melarang polwan berjilbab. Paragraf kedua, Amir meminta peninjauan ulang SK Kapolri, karena jilbab bisa menyesuaikan pakaian dinas.

Pertengahan berita, muncul pendapat Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane. Pane menganggap sikap Wakapolri Nanan yang memberi pilihan polwan untuk mengundurkan diri jika ingin berjilbab sangat otoriter. Menurutnya, jilbab penting untuk menghindarkan polwan dari tindak pelecehan seksual yang terjadi karena pakaiannya cenderung ketat. Pada akhir berita, Pane memberi masukan kepada polwan untuk meminta dukungan pihak berkompeten melindungi hak asasi. Selain itu meminta polwan mencari referensi yang menegaskan pemakaian jilbab tidak mengganggu kinerja polwan. Tujuan akhir yang diharapkan Pane adalah dengan pemakaian jilbab oleh polwan diharapkan dapat memenuhi perintah menutup aurat dan menghindarkan dari pelecehan seksual.

Republika hanya menampilkan dua pendapat narasumber berita, serta hanya menuliskan pernyataan ketidaksetujuan darinya, tanpa mewawancarai instansi kepolisian. Republika terkesan mencari penguat untuk menolak pelarangan penggunaan jilbab dari pihak yang berkompeten mengomentari, seperti MUI, sebagai lembaga pembuat fatwa, dan IPW, sebagai lembaga pengamat Polri. Republika mengambil sudut pandang sosial keagamaan saat memilih kutipan

pendapat narasumber, sehingga terlihat menjunjung hak beribadah. Republika seolah menjadi wadah dan bagian dari berbagai pihak kontra dengan permasalahan tersebut, serta terkesan mendesak Polri untuk mengizinkan polwan berjilbab.

c. Semantik

c.1. Latar

Latar yang diambil wartawan Republika dalam berita Pimpinan Polri Tak Berhak Larang Polwan Berjilbab, yaitu:

Menurutnya, alasan pelarangan jilbab tidak memiliki dasar yang kuat untuk diterapkan. Setiap manusia memiliki hak untuk beribadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. “Tidak ada alasan dilarang. Toh, bisa disesuaikan.”

Melalui pendapat Amir, wartawan Republika ingin menunjukkan latar belakang tidak perlunya pelarangan jilbab. Setiap manusia memiliki hak beribadah sesuai kepercayaan yang dijamin dalam konstitusi. Termasuk ibadah menutup aurat dengan jilbab, sehingga tidak ada alasan melarang pemakaian jilbab. Republika ingin menyampaikan model jilbab tidak semuanya berbentuk besar dan terdapat juntaian kain yang dapat mengganggu kinerja, tetapi model jilbab bisa menyesuaikan pakaian dinas agar tetap nyaman tanpa meninggalkan esensi menutup aurat. Republika menganggap permasalahan tersebut sebagai ketidakadilan penerapan hak asasi manusia, karena hanya polwan Aceh yang diperbolehkan berjilbab.

c.2. Detil

Polwan harus mengonsolidasikan diri ke Komisi III DPR RI, ormas Islam, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Konsolidasi ini untuk meminta dukungan dan menekan pimpinan Polri.

Paragraf tersebut menyebutkan secara detail kepada siapa saja polwan menggolongkan dukungan perizinan berjilbab. Polwan diminta bersatu dengan, *pertama*, Komisi III DPR RI, bertugas melindungi hak asasi manusia. *Kedua*, ormas Islam, organisasi yang berjuang di bidang dakwah. *Ketiga*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang memperjuangkan hak perempuan. Republika menganggap dengan bersatunya pihak-pihak tersebut dapat memperkuat langkah polwan mendesak Polri agar mengizinkan polwan berjilbab. Pemunculan pendapat tersebut mengesankan bahwa Republika setuju dan menganjurkan konsolidasi dilakukan oleh polwan.

c.3. Maksud

Karena itu, Amir meminta agar surat keputusan Kapolri No Pol: Skep/702/IX/2005 yang melarang polwan berjilbab bisa ditinjau kembali. Hal tersebut dibutuhkan untuk melihat substansi pemakaian jilbab, yaitu menutup aurat bagi polwan Muslim.

Maksud dari paragraf tersebut mengenai permintaan Wakil Sekretaris Jenderal MUI Amir Syah, untuk menilik kembali Surat Keputusan (SK) Kapolri yang melarang polwan berjilbab. Penggunaan konjungsi pada kata “hal tersebut”, menunjukkan tujuan yang diharapkan, yaitu jilbab menutup aurat polwan. MUI

terlihat bersikukuh memperjuangkan hak dan kewajiban polwan untuk menutup aurat. Republika seperti ikut meminta peninjauan SK tersebut, dengan menuliskan kata “hal tersebut dibutuhkan”.

c.4. Pra anggapan

Jilbab sebenarnya penting bagi polwan untuk menghindari pelecehan seksual dari sesama anggota polisi dan atasannya. “Ini baik untuk menghindari pelecehan seksual,” tuturnya.

Penggunaan kata sebenarnya, menyatakan keadaan yang seharusnya benar tetapi belum terlaksana. Republika berusaha menunjukkan pentingnya jilbab bagi polwan saat berdinias, berkaca pada pengalaman terdahulu, yaitu terdapat polwan yang mengalami tindak pelecehan oleh anggota polisi. Seperti pelecehan yang dialami Brigadir Polisi Satu (Briptu) Rani oleh atasannya saat mengukur pakaian. Sehingga jilbab diharapkan menjadi pelindung polwan dari tindak asusila.

d. Sintaksis

d.1. Kata Ganti

Di banyak negara, banyak polwan yang mengenakan jilbab. Di dalam negeri, polwan di Aceh bisa dijadikan contoh. Tugas mereka tidak terganggu meski mengenakan jilbab.

Kata ganti mereka digunakan untuk menyebut orang ketiga jamak atau orang yang dibicarakan, dengan jumlah lebih dari dua. Wartawan Republika menggunakan kata ganti mereka untuk menunjuk polwan di Aceh dan negara lain yang menggunakan jilbab. Kalimat tersebut ditampilkan sebagai pembanding dan contoh, yakni meskipun polwan mengenakan jilbab tetapi tugas

mereka tidak terganggu. Republika ingin mematahkan alasan jilbab mengganggu kinerja polwan, dengan menyuguhkan bukti polwan berjilbab di berbagai negara, termasuk Aceh.

d.2. Koherensi

Tren jilbab tidak harus “gombrong”, namun tetap menutupi aurat wanita yang seharusnya ditutup.

Kalimat tersebut menggunakan koherensi pertentangan, dengan konjungsi namun. Berfungsi menghubungkan dua kalimat dengan fakta berbeda, yakni pada “tren jilbab tidak harus gombrong” dengan “tetap menutupi aurat wanita yang seharusnya ditutup”. Anak kalimat digunakan untuk menjelaskan permasalahan kalimat pertama. Republika ingin menyampaikan pesan kepada Polri melalui pernyataan Amir, bahwa jilbab yang kelak dipakai polwan tidak harus gombrong, namun tetap menutupi aurat. Penggunaan kata gombrong memiliki maksud terlalu longgar seperti baju takwa yang digunakan wanita Muslim.

d.3. Bentuk Kalimat

Presidium IPW Neta S Pane menyayangkan pernyataan Wakil Kepala Polri Komjen Nanan Sukarna yang memberikan pilihan bagi polwan yang ingin berjilbab agar meninggalkan statusnya sebagai polisi alias mengundurkan diri atau pensiun.

Penggunaan kalimat aktif pada kata memberikan, secara eksplisit menunjukkan bahwa Sukarna telah menyediakan konsekuensi bagi polwan yang ingin berjilbab. Konsekuensi tersebut yakni melepas statusnya sebagai polisi. Kalimat tersebut

mencerminkan sikap setuju Republika dengan pendapat Pane dan ikut menyayangkan pernyataan Sukarna. Penekanan yang dilakukan yakni Sukarnalah yang memberi pilihan tersebut, dan polwan sebagai penerima konsekuensi. Penulisan kalimat tersebut memberi kesan bahwa instansi kepolisian kaku dalam menyikapi keinginan anggotanya menjalankan perintah agama.

e. Stilistik

Jilbab sebenarnya penting bagi polwan untuk menghindari pelecehan seksual dari sesama anggota polisi dan atasannya. Lihat juga kalimat berikut:
 “Itu bukanlah pernyataan arif dari seorang pemimpin. Sangat otoriter,”

Wartawan Republika memilih kata pelecehan seksual untuk menunjukkan tindakan yang diterima polwan karena berpakaian cenderung ketat. Kata lain yang bisa dipakai selain pelecehan seksual, yaitu tindak asusila, merendahkan, cabul, dan tindakan tidak bermoral. Pemilihan kata pelecehan seksual memiliki makna implisit, menyembunyikan tindakan buruk yang pernah diterima seorang polwan saat bekerja di kepolisian, dengan tujuan menghargainya.

f. Retoris

f.1. Grafis

Tren jilbab tidak harus “gombrong”, namun tetap menutupi aurat wanita yang seharusnya ditutup. Dan kalimat berikut:
 Neta menegaskan, pelecehan seksual terhadap polwan sangat besar kemungkinannya, melihat pakaiannya yang “cenderung” ketat.

Penggunaan tanda petik dua oleh wartawan mengandung maksud bahwa kata di dalamnya memiliki makna khusus yang

ingin ditekankan. Kalimat pertama bermaksud menjelaskan model jilbab yang nantinya dipakai oleh polwan tidak harus kedodoran atau terlalu besar, seperti kesan orang ketika mendengar kata baju Muslim. Jilbab dapat disesuaikan agar menunjang gerak polwan di lapangan. Pada kalimat kedua, wartawan ingin menonjolkan salah satu peluang terjadinya pelecehan seksual yang dialami polwan dikarenakan pakaian polwan yang condong ke arah ketat.

f.2. Metafora

Kiasan dalam berita dapat dilihat dalam kalimat:

“Itu bukanlah pernyataan arif dari seorang pemimpin. Sangat otoriter,”

Wartawan Republika menuliskan pendapat Presidium IPW Pane mengenai pernyataan Wakapolri Nanan Sukarna. Kata yang dituliskan wartawan yaitu “Itu bukanlah pernyataan arif”, memiliki maksud itu bukanlah pernyataan bijak, pandai, dan tidak seharusnya diucapkan seorang pemimpin. Penulisan kutipan langsung tersebut memunculkan opini publik bahwa pejabat kepolisian tidak mencerminkan sikap bijaksana dan terkesan tidak dapat mengayomi anggotanya.

f.3. Ekspresi

Terdapat ekspresi kontra perihal masalah ini, hal tersebut terlihat dalam kalimat:

Pihaknya sangat tidak setuju dengan pakaian polwan yang terlalu seksi dan ketat, seperti rok yang terlalu tinggi dan baju yang terlampau ketat.

Republika memunculkan pendapat Amir yang mewakili MUI. Sebagai lembaga yang mengayomi umat Muslim, MUI menyatakan sangat tidak setuju terhadap pakaian polwan selama ini, ditunjukkan dengan kata seksi yang mengandung konotasi negatif, merangsang berahi. Pada pembertiaan kali ini, Republika hanya menampilkan ekspresi narasumber yang kontra terhadap belum diizinkan penggunaannya jilbab polwan, dan terkesan menghakimi Polri. Republika terlihat memberi perhatian berita dan terkesan ikut tidak menyetujui keputusan polri yang belum mengizinkan polwan berjilbab, dengan mencari penguat pendapat.

4.1.3. Berita tanggal 20 November 2013 berjudul Mulai Hari Ini Polwan

Bebas Kenakan Jilbab

a. Tematik

Wartawan Republika memberi judul berita “Mulai Hari Ini Polwan Bebas Kenakan Jilbab”. Judul tersebut menjelaskan topik dan isi berita yang disampaikan. Topik tersebut adalah:

Perizinan penggunaan jilbab bagi polisi wanita menemui titik terang. Polri akhirnya memberikan keleluasaan bagi polwan mengenakan jilbab mulai Rabu (20/11). Kapolri Jenderal Sutarmen memberikan restu kepada seluruh polwan untuk berjilbab karena menutup aurat merupakan hak setiap manusia.

Topik berita menceritakan kabar gembira bagi polwan karena keinginannya menggunakan jilbab saat bertugas telah diizinkan oleh kapolri. Wartawan seolah menggambarkan usaha polwan dan berbagai pihak dalam memperjuangkan penggunaan jilbab polwan saat bertugas akhirnya menemui hasil, dengan adanya restu dari Kapolri

Jenderal Sutarman. Dasar penggunaan jilbab dijelaskan sebagai hak setiap manusia yang dijamin negara dalam konstitusi. Perizinan tersebut memang seharusnya diberikan bagi polwan, karena dalam UUD 1945 pasal 29 ayat 2 telah mempertegas kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Melihat hal tersebut, seharusnya penggunaan jilbab sudah diizinkan saat konstitusi diterapkan dalam masyarakat.

b. Skematik

Berita diawali dengan informasi perizinan jilbab bagi polwan oleh Kapolri Jenderal Sutarman mulai 20 November 2013. Selanjutnya, Sutarman menjelaskan syarat jilbab, yaitu model dan warnanya harus sama dengan seragam polwan Aceh. Selain itu polwan harus membeli jilbab sendiri karena belum ada anggaran penyediaan. Paragraf selanjutnya, Republika menjelaskan awal munculnya desakan perizinan jilbab polwan saat Pradopo masih menjabat Kapolri, namun baru mendapat izin saat pemimpin Polri digantikan Sutarman, meski belum ada Peraturan Kapolri (perkap) untuk memperkuat perizinan.

Paragraf selanjutnya, Republika menampilkan pendapat narasumber yang mendukung langkah Sutarman. Dimulai dari Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) Hamidah Abdurrahman, yang siap membantu mewujudkan anggaran jilbab. Diakhiri pendapat anggota Komisi III DPR Ahmad Yani, yang

mendukung sikap Sutarman meski perkap belum terbit. Yani juga sedang menyiapkan anggaran penyediaan jilbab.

Republika menempatkan pernyataan Sutarman yang mengizinkan polwan berjilbab pada awal berita. Dilanjutkan kronologi awal munculnya desakan perizinan polwan berjilbab. Di akhir berita barulah ditampilkan pendapat narasumber yang semuanya mendukung sikap Sutarman meski perkap belum terbit. Susunan tersebut memberi kesan Sutarman sebagai pahlawan polwan Muslim, sikapnya dianggap sangat tepat, dan memang harus dilakukan. Wartawan juga membandingkan masa jabatan Pradopo yang tidak merespon serius permasalahan jilbab polwan dengan Sutarman yang mengizinkan polwan berjilbab, sehingga menimbulkan kesan Sutarman lebih bijak dan menghargai hak beribadah polwan.

c. Semantik

c.1. Latar

Desakan perizinan berjilbab untuk polwan telah muncul sejak pertengahan 2012 ketika Jenderal Timur Pradopo masih menjabat kapolri. Meski tak menolak usulan itu, Timur tak kunjung mengeluarkan Perkap terkait aturan berjilbab. Sutarman juga tak mengeluarkan perkap, tetapi mempersilakan polwan berjilbab dan menjamin tak ada teguran atau sanksi.

Latar yang dituliskan Republika mengenai awal munculnya desakan perizinan berjilbab bagi polwan, ketika Pradopo masih menjabat sebagai kapolri. Republika membandingkan sikap antara mantan Kapolri Timur dan Kapolri Sutarman, dalam menanggapi

desakan perizinan jilbab polwan. Melalui paragraf tersebut, Republika seakan menyanjung atau memuji sikap Sutarman dibanding Pradopo. Republika ingin menyampaikan, perizinan polwan berjilbab seharusnya diberikan sejak Pradopo masih menjadi kapolri, karena antara Sutarman dan Pradopo sama-sama belum menerbitkan perkap. Perbedaannya Sutarman mengizinkan polwan berjilbab, dan mendapat sambutan baik dari masyarakat.

c.2. Detil

“Mudah-mudahan polwan dapat memanfaatkan kesempatan ini artinya, berjilbab dengan menggunakan rok panjang, celana panjang, dan baju lengan panjang.”

Republika menuliskan secara detil pendapat Hamidah, Komisioner Komisi Kepolisian Nasional. Bahwa, busana polwan berjilbab meliputi rok panjang, celana panjang, dan baju berlengan panjang. Pengulangan kata panjang menunjukkan penekanan pada setiap kriteria seragam jilbab yaitu harus panjang, sebagai bentuk respon positif atas restu dari Sutarman. Kriteria panjang tersebut sebagai pembeda antara baju yang sebelumnya dipakai polwan dengan seragam baru mereka, bernama jilbab.

c.3. Maksud

Sutarman mempersilakan polwan berjilbab tanpa perlu menunggu keluarnya peraturan kapolri (perkap) darinya. “Jilbab itu hak asasi seseorang. Saya sudah sampaikan pada anggota, yang punya jilbab silakan gunakan,” ujar Sutarman di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta. Selasa (19/11). Syaratnya, model dan warna harus sama dengan jilbab polwan di Polda Aceh.

Maksud yang ingin ditampilkan Republika mengenai syarat model dan warna jilbab harus sama dengan polwan Polda Aceh, tujuannya untuk keseragaman dan kekompakkan baju jilbab dinas Polri. Sutarman menjadikan Polwan Aceh sebagai contoh karena mereka sudah berjilbab sejak 2004. Syarat tersebut dimaksudkan sebagai pengganti perkap yang belum terbit untuk mengatur seragam jilbab polwan agar tidak berbeda satu sama lain.

c.4. Pra anggapan

Apabila ada dana yang tersalurkan untuk jilbab dari anggaran yang tak seharusnya, tentu itu akan menyalahi aturan.

Pernyataan tersebut dipandang terpecah meskipun belum terbukti kebenarannya. Wartawan menggunakan kata apabila untuk menegaskan pernyataan tersebut, dengan anak kalimat sebagai penjelas. Republika ingin memeperlihatkan Polri, sebagai lembaga penegak dan taat hukum, Polri tidak bisa sembarangan menggunakan dana untuk keperluan lain yang belum dianggarkan. Terdapat proses menganggarkan dana pengadaan jilbab polwan, sehingga Polri meminta kerelaan polwan untuk membeli seragam dengan uang pribadi.

d. Sintaksis

d.1. Kata Ganti

Anggota Komisi III DPR Ahmad Yani mengatakan, pihaknya sedang menyiapkan anggaran bagi polri agar dapat menyediakan jilbab yang seragam untuk polwan. "Tahun depan kami siapkan," ujar Yani.

Republika menggunakan kata ganti kami untuk menunjukkan sikap Yani dan Anggota Komisi III DPR yang akan menyiapkan anggaran penyediaan seragam jilbab polwan tahun depan. Kata ganti kami menimbulkan jarak antara narasumber dan pembaca, dengan kata lain hanya narasumber yang melakukan kegiatan, dan tidak melibatkan pembaca dalam proses tersebut. Kalimat langsung yang ditulis singkat oleh wartawan memunculkan kesan tegas Komisi III DPR dalam menanggapi dan menindaklanjuti izin polwan berjilbab.

d.2. Koherensi

Desakan perizinan berjilbab untuk polwan telah muncul sejak pertengahan 2012 ketika Jenderal Timur Pradopo masih menjabat kapolri. Meski tak menolak usulan itu, Timur tak kunjung mengeluarkan perkap terkait aturan berjilbab. Sutarman juga tak mengeluarkan perkap, tetapi mempersilahkan polwan berjilbab dan menjamin tak ada teguran atau sanksi.

Wartawan Republika menggunakan koherensi pertentangan, dengan kata hubung meski dan tetapi. Koherensi pertentangan menyebabkan makna berlainan ketika menghubungkan kalimat. Paragraf tersebut menjelaskan perbandingan keputusan antara mantan kapolri dengan kapolri pada saat ini dalam menghadapi persoalan jilbab polwan. Koherensi tersebut terkesan ingin menunjukkan kepada Pradopo bahwa seharusnya kebijakan yang diberikan Sutarman juga dilakukan sejak dahulu olehnya. Kalimat tersebut menimbulkan opini publik bahwa sikap Sutarman bijak dalam memberi izin polwan berjilbab, dengan tanpa menunggu

terbitnya perkap yang mengatur kebijakan tersebut, karena berjilbab merupakan hak manusia termasuk bagi polwan.

d.3. Bentuk Kalimat

Sutarman mempersilakan polwan berjilbab tanpa perlu menunggu keluarnya peraturan kapolri (perkap) darinya.

Kalimat tersebut menggunakan struktur kalimat aktif untuk menekankan siapa yang mempersilakan polwan berjilbab. Republika menempatkan Sutarman sebagai subjek yang melakukan tindakan. Sutarman telah mempersilakan polwan untuk berjilbab tanpa menunggu perkap. Kata mempersilakan, mengandung maksud menyuruh dengan hormat, tanpa paksaan.

e. Stilistik

Kapolri Jenderal Sutarman memberikan restu kepada seluruh polwan untuk berjilbab karena menutup aurat merupakan hak setiap manusia.

Wartawan Republika lebih suka menggunakan kata restu daripada izin, untuk menggambarkan kebijakan Sutarman untuk mempersilakan polwan berjilbab. Kata restu memiliki maksud pemberian berkat, doa restu untuk kebahagiaan dari orang yang dihormati. Kata izin, yang berarti pernyataan mengabulkan keinginan melakukan sesuatu, dinilai lebih formal daripada restu. Kata restu terkesan memperlihatkan kebijakan kapolri diberikan secara lisan tanpa disertai perkap. Kata restu terkesan lebih personal dan sakral serta erat kaitannya dengan doa.

f. Retoris

f.1. Grafis

Desakan perizinan berjilbab untuk polwan telah muncul sejak pertengahan 2012 ketika Jenderal Timur Pradopo masih menjabat kapolri. Meski tak menolak usulan itu, Timur tak kunjung mengeluarkan perkap terkait aturan berjilbab.

Grafis yang ingin ditekankan mengenai wartawan yang menuliskan tahun awal munculnya desakan perizinan jilbab, sejak pertengahan 2012. Tahun tersebut menggambarkan berapa lama polwan menunggu untuk mendapat izin berjilbab, hingga baru diperbolehkan mulai 20 November 2013. Secara implisit wartawan mengatakan, dalam kurun waktu hampir satu tahun Polri membendung hak polwan menjalankan perintah agama.

f.2. Metafora

Perizinan penggunaan jilbab bagi polisi wanita (polwan) menemui titik terang. Serta kalimat berikut:
Yani mendukung sikap Sutarman yang memberi jalan tengah bagi polwan untuk berjilbab meski peraturan resmi belum keluar.

Wartawan Republika menggunakan metafora pada kata titik terang dan jalan tengah. Pada kalimat pertama, wartawan ingin menjelaskan bahwa usaha berbagai pihak dalam memperjuangkan penggunaan jilbab bagi polwan menemui kejelasan atau akan terlaksana. Pada kalimat kedua, wartawan memberi penjelasan mengenai jalan kompromi atau keputusan yang diambil oleh pihak berselisih pendapat. Keputusan tersebut adalah memberi

izin polwan berjilbab tanpa menunggu keluarnya peraturan resmi dari kapolri. wartawan ingin mengabarkan kebijakan yang diinginkan polwan dan beberapa pihak, yakni izin berjilbab, dari ucapan lisan kapolri, alasan mengizinkan, serta syarat jilbab.

f.3. Ekspresi

Wartawan Republika menampilkan pendapat Anggota Komisi III DPR, Ahmad Yani, berisikan sikap Yani dan Abdurrahman yang mendukung keputusan Sutarman dalam kalimat berikut:

Yani mendukung sikap Sutarman yang memberi jalan tengah bagi polwan untuk berjilbab meski peraturan resmi belum keluar.

Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) Hamidah Abdurrahman mengatakan, keleluasaan dari Sutarman tanpa menunggu keluarnya perkap merupakan langkah tepat dan dapat menenangkan polwan.

Republika tampak ikut menyetujui kebijakan Kapolri. Terlihat dari pemunculan pendapat narasumber yang mendukung keputusan Sutarman untuk mengizinkan polwan menggunakan jilbab, tanpa menunggu perkap keluar. Pada berita ini, Republika tidak mewawancarai ekspresi polwan selaku pihak yang ingin berjilbab. Pemilihan tersebut terkesan ingin mengetahui bagaimana ekspresi pihak kepolisian, diwakili Kopolnas, dan berbagai pihak yang membantu polwan menyuarkan permintaan izin berjilbab, diwakili oleh anggota Komisi III DPR.

4.1.4. Berita tanggal 21 November 2013 berjudul Kapolri Janji Terbitkan

Perkap Jilbab

a. Tematik

Setelah memberi izin secara lisan kepada polisi wanita (polwan) untuk mengenakan jilbab, Kapolri Jenderal Sutarman berjanji mengeluarkan Peraturan Kapolri (Perkap) guna memperkuat aturan itu. Perkap masih perlu waktu agar matang dan paten saat diterbitkan.

Tema berita menjelaskan tindak lanjut kapolri setelah memberi izin penggunaan jilbab, yaitu mengeluarkan Peraturan Kapolri (perkap). Selain pada *lead*, gagasan utama berita ini juga terlihat dari judul yang ditampilkan, yaitu “Kapolri Janji Terbitkan Perkap Jilbab”. Republika seolah ingin menyampaikan kepada publik agar jangan menekan Polri untuk segera mengeluarkan perkap, dengan menuliskan “Perkap masih perlu waktu agar matang dan paten saat diterbitkan.” Terdapat banyak hal yang perlu dipertimbangkan dan membutuhkan waktu dalam membuat perkap agar tidak asal terbit, tetapi kapolri berjanji untuk mengeluarkannya. Perkap penting untuk melindungi dan menjamin penggunaan jilbab polwan. Hal tersebut disampaikan Martiany, bahwa kontroversi mengenai kebijakan polwan berjilbab seharusnya segera berakhir dengan keluarnya perkap (Martiany, 2013: 12), sehingga diharapkan perkap segera terbit.

b. Skematik

Berita diawali dengan janji Kapolri Jenderal Sutarman untuk mengeluarkan peraturan kapolri (perkap). Selanjutnya, Sutarman

memastikan polwan bisa bebas berjilbab saat berdinasnya asalkan mengikuti syarat yang ditentukan. Paragraf selanjutnya, wartawan menuliskan Polri telah menyiapkan desain dan warna jilbab polwan. Pada pertengahan hingga akhir berita, Republika menampilkan pendapat narasumber dari instansi kepolisian yang menyambut positif kebijakan Kapolri. Sementara itu, anggota Komisi III DPR Ahmad Yani mendorong agar anggaran penyediaan jilbab segera tersedia.

Susunan berita yang dibuat wartawan Republika menggambarkan harapan berbagai pihak kepada Kapolri untuk memberi langkah selanjutnya guna menindaklanjuti perizinan jilbab. Tetapi wartawan memberi penjelasan di awal berita bahwa butuh waktu yang tidak singkat untuk merumuskan perkap, sehingga tidak bisa didesak untuk cepat mengeluarkannya.

c. Semantik

c.1. Latar

Setelah memberi izin secara lisan kepada polisi wanita (polwan) untuk mengenakan jilbab, Kapolri Jenderal Sutarmanto berjanji mengeluarkan Peraturan Kapolri (Perkap) guna memperkuat aturan itu. Perkap masih perlu waktu agar matang dan paten saat diterbitkan.

Wartawan Republika ingin menyampaikan latar belakang Kapolri berjanji mengeluarkan perkap karena hal tersebut berguna memperkuat peraturan perizinan polwan berjilbab. Perkap menjadi tindak lanjut dari perizinan jilbab oleh Kapolri, tetapi perkap membutuhkan waktu yang tidak singkat agar matang dan

siap saat diterbitkan, sehingga diharapkan tidak ada pihak yang menekan agar segera menerbitkan perkap.

c.2. Detil

Sejak dua bulan lalu, Polri telah membuat sejumlah desain, pola, dan warna jilbab yang kelak akan digunakan oleh polwan yang hendak berhijab.

Wartwan Republika menunjukkan respon serius Polri dalam menanggapi perizinan jilbab berupa pembuatan desain jilbab polwan, sejak dua bulan sebelum kapolri memberi izin berjilbab. Penulisan secara detail terlihat pada kapan, apa yang dilakukan, dan siapa yang melakukan. Penjelasan tersebut yakni sejak dua bulan lalu Polri membuat desain, pola, dan warna jilbab untuk digunakan polwan. Usaha tersebut menjadi bagian perumusan perkap yang mengatur ketentuan jilbab polwan, yang saat ini digantikan terlebih dahulu dengan aturan jilbab polwan Aceh.

c.3. Maksud

Syarat lain yang ia harap dapat dimaklumi ialah agar polwan rela menyediakan jilbabnya dengan membeli dari uang saku masing-masing. Alasannya, Polri belum memiliki anggaran untuk penyediaan jilbab.

Mengenai syarat jilbab yang harus dibeli dengan uang pribadi polwan, wartawan ingin menjelaskan hal tersebut karena Polri belum membuat anggaran penyediaan. Meski demikian, polwan dapat bebas berjilbab, asalkan warna dan model jilbab sama dengan seragam polwan Aceh. Penggunaan kata “harap dapat dimaklumi” oleh wartawan, menggambarkan permintaan

Polri agar syarat tersebut dimengerti polwan dan berbagai pihak, karena dihitung sebagai peraturan baru, sehingga belum ada persiapan jauh hari. Polwan tentunya dengan rela memenuhi syarat tersebut, karena sudah lama ingin menggunakan jilbab.

c.4. Pra anggapan

Sejak dua bulan lalu, Polri telah membuat sejumlah desain, pola, dan warna jilbab yang kelak akan digunakan oleh polwan yang hendak berhijab.

Pernyataan tersebut menggambarkan keseriusan pihak kepolisian dalam memberikan izin polwan berjilbab. Meski belum ada peraturan resmi yang mengatur model dan warna jilbab, Polri telah merancang seragam yang nantinya digunakan polwan Muslim. Penggunaan kata “sejumlah” memberi kesan terdapat banyak desain yang dibuat Polri sebagai pilihan agar sesuai kriteria syariat dan standar seragam dinas.

d. Sintaksis

d.1. Kata Ganti

“Yang ingin berjilbab, silakan. Nanti anggarannya kami ajukan”

“Malah kami sudah ajukan ke Komisi III DPR soal itu, tunggu anggarannya dan putusan,” ujar Asisten Kapolri Bidang Sarana dan Prasarana Irjen Anton Bachrul Alam, kemarin.

Kata ganti kami dalam kalimat pertama menunjuk pada Sutarman dan instansi kepolisian yang akan menganggarkan dana penyediaan jilbab. Pada kalimat kedua, kami, menunjukkan tindakan Polri telah mengajukan sejumlah desain jilbab. Kata

ganti kami memberikan jarak antara pihak bersangkutan dengan pembaca, dengan kata lain pembaca tidak diikuti dalam pernyataan atau tindakan tersebut. Hal tersebut sebagai pernyataan resmi Polri yang diwakili Sutarman asisten kapolri.

d.2. Koherensi

Meski Perkap belum terbit, Sutarman memastikan polwan Muslimah bisa leluasa berjilbab saat berdinis. Polwan di seluruh satuan tak perlu ragu berjilbab, asalkan mengikuti model yang digunakan di Polda Aceh.

Republika lebih suka menggunakan penjelasan kontras dengan konjungsi meski. Seolah Republika membuka wacana masyarakat mengenai kelonggaran Kapolri dalam memberikan izin polwan berjilbab, walaupun perkap belum terbit. Republika ingin menjelaskan belum adanya perkap tidak menjadi halangan polwan untuk tetap menutup aurat.

d.3. Bentuk Kalimat

Republika menggunakan kalimat pasif dan aktif dalam paragraf berikut:

Setelah memberi izin secara lisan kepada polisi wanita (polwan) untuk mengenakan jilbab, Kapolri Jenderal Sutarman berjanji mengeluarkan Peraturan Kapolri (Perkap) guna memperkuat aturan itu. Perkap masih perlu waktu agar matang dan paten saat diterbitkan.

Republika menggunakan struktur kalimat aktif dengan kata, memberi, mengenakan, berjanji mengeluarkan, dan memperkuat. Kalimat di atas menekankan pada siapa yang melakukan kegiatan, subjek tersebut adalah Sutarman. Republika ingin menyampaikan

bahwa Kapolri Jenderal Sutarman adalah orang yang berwenang memberi kebijakan pada jilbab polwan. Paragraf tersebut juga menggunakan struktur kalimat pasif, dengan menekankan pada apa yang diterbitkan Sutarman, yaitu perkap, sebagai penguat aturan, yang memakan waktu untuk menerbitkannya.

e. Stilistik

Sejak dua bulan lalu, Polri telah membuat sejumlah desain, pola, dan warna jilbab yang kelak akan digunakan oleh polwan yang hendak berhijab.

Pilihan kata yang digunakan wartawan Republika adalah desain dan pola. Kata tersebut dapat diganti dengan kata model, karena antara desain dan pola memiliki makna yang hampir sama. Penggunaan kata desain dan pola bermaksud menjelaskan bahwa Polri baru membuat kerangka awal seragam jilbab polwan, kemudian diperhalus dengan kata tersebut.

f. Retoris

f.1. Grafis

Meski Perkap belum terbit, Sutarman memastikan polwan Muslimah bisa leluasa berjilbab saat berdinas. Polwan di seluruh satuan tak perlu ragu berjilbab, asalkan mengikuti model yang digunakan di Polda Aceh. Syarat lain yang ia harap dapat dimaklumi ialah agar polwan rela menyediakan jilbabnya dengan membeli dari uang saku masing-masing.

Wartawan menekankan kembali syarat yang harus dipatuhi polwan saat menggunakan jilbab di lapangan. Syarat tersebut telah dituliskan wartawan pada berita sebelumnya, berjudul Mulai Hari Ini Polwan Bebas Kenakan Jilbab. Republika seolah ingin

menegaskan serta mengingatkan kembali syarat jilbab polwan. Tujuannya agar tidak ada permasalahan yang akan dialami polwan, mengingat perjuangan memperoleh izin berjilbab memakan waktu lama.

f.2. Metafora

Perkap masih perlu waktu agar matang dan paten saat diterbitkan.

Republika menggunakan metafora pada kata matang. Kata “matang” seolah mencerminkan buah yang sudah siap dipetik atau masakan yang sudah waktunya diangkat. Republika ingin menjelaskan penggunaan kata matang, menggambarkan perkap tidak bisa dibuat asal-asalan dengan waktu singkat, tetapi butuh waktu agar sempurna saat diterbitkan.

f.3. Ekspresi

Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Awi Setiyono mengatakan, pihaknya mendukung penuh jika ada polwan yang ingin mengenakan jilbab karena Kapolri telah memberikan izin. Lihat juga kalimat berikut:
Polwan di Polres Bekasi bersyukur atas izin pemakaian jilbab. Kabag Perencanaan Polres Kota Bekasi Kopolri Rahayu sudah menantikan kebijakan ini sejak masuk Polri.

Wartawan Republika dalam berita tersebut menampilkan pendapat narasumber yang bersikap pro terhadap perizinan penggunaan jilbab bagi polwan. Kebanyakan narasumber berasal dari anggota kepolisian. Pemilihan tersebut mencerminkan sikap Republika yang ingin mengetahui bagaimana tanggapan anggota kepolisian, yakni ikut gembira terhadap kebijakan kapolri.

Penulisan pendapat tersebut dapat mencerminkan bahwa tidak hanya Republika yang ikut gembira, namun pihak lain juga, melalui pendapat dari anggota kepolisian.

4.1.5. Berita tanggal 30 November 2013 berjudul Jilbab Polwan Ditunda

a. Tematik

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menunjukkan sikap ganjil dalam pemberian izin bagi polisi wanita (polwan) untuk berjilbab. Polri meminta polwan menunda penggunaan jilbab hingga ada aturan resmi dan parlemen menyetujui alokasi anggaran penyediaan busana tersebut.

Tema yang ingin disampaikan wartawan Republika mengenai ketidakkonsistenan kapolri dalam merespon perizinan jilbab polwan. Kebijakan tersebut dinilai ganjil oleh wartawan, dan terlihat ada yang ditutupi. Tanggal 20 November 2013 kapolri memberi izin secara lisan pada polwan untuk mengenakan jilbab, tanpa perlu menunggu keluarnya peraturan kapolri (perkap). Janggalnya, selang seminggu kapolri meminta polwan menunda penggunaan jilbab hingga terdapat peraturan resmi. Kebijakan yang mendadak tersebut menjadi tanda tanya dan polemik di berbagai kalangan, bahkan muncul kecurigaan adanya kelompok antijilbab dalam Polri. Melihat proses perizinan yang alot dan rawan terjadi perubahan kebijakan secara mendadak. Hal tersebut diperkuat pernyataan dalam jurnal penelitian, bahwa dalam konteks Indonesia, jilbab seringkali menjadi bentuk *survival strategy*, alasan kolektif agar seperti yang lain, fashion, dan kadang justru simbol otoritas (Udasmoro, 2010: 7).

b. Skematik

Wartawan Republika mengawali berita dengan mengatakan Polri menunjukkan sikap ganjil dalam pemberian izin polwan berjilbab. Polri meminta polwan menunda berjilbab hingga ada peraturan resmi. Selanjutnya dituliskan pendapat Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Ronny F Sompie, menurutnya ada yang perlu diluruskan, sehingga terbit telegram rahasia untuk menunda penggunaan jilbab polwan. Pada paragraf selanjutnya, wartawan menjelaskan tanggal terbitnya perkap beserta inti isinya. Selanjutnya, Sutarman menyatakan pengaturan yang perlu dilakukan tidak hanya terkait warna, tetapi juga anggaran.

Wartawan menuliskan pendapat narasumber yang kontra akan penundaan tersebut pada pertengahan hingga akhir berita. Dimulai dari anggota kepolisian, ustaz, hingga lembaga keislaman. Susunan tersebut memberi kesan bahwa Republika menganggap penting tanggapan anggota kepolisian, barulah dilanjutkan pada narumber berorientasi keislaman, untuk menegaskan kembali syariat Islam. Republika terlihat menganggap ganjil keluarnya telegram rahasia tentang penundaan jilbab polwan. Kebijakan yang terkesan terburu-buru ini menimbulkan prasangka adanya kelompok antijilbab dalam tubuh kepolisian. Kelompok antijilbab akan memandang persoalan jilbab tidak sekadar penutup aurat, tetapi sebagai keberhasilan memasukkan ideologi Islam dalam instansi kepolisian.

c. Semantik

c.1. Latar

Banyak polwan yang menggunakan jilbab dengan warna dan tata cara sesuai di Polda Aceh. Rupa-rupa jilbab mengurangi konsep keseragaman, kekompakan, dan kesetaraan Polri dalam berbusana. Karena itu, Polri menerbitkan telegram rahasia agar penggunaan jilbab bagi polwan ditunda hingga menunggu aturan yang jelas.

Latar yang ingin disampaikan wartawan mengenai penyebab penundaan jilbab dikarenakan penggunaan jilbab oleh polwan terlihat tidak beraturan, hal tersebut dipertegas pendapat Sompie, selaku anggota pemberi informasi dari institusi kepolisian. Latar belakang penundaan lebih ditekankan pada wacana tidak sejenisnya warna dan tata cara penggunaan jilbab dengan seragam polwan di Aceh. Perbedaan tersebut menjadikan alasan keluarnya telegram rahasia, surat kilat yang bersifat rahasia oleh Polri. Pernyataan tersebut memberi kesan bahwa polwan telah bersalah, sehingga izin pemakaian jilbab ditunda.

c.2. Detil

Kebijakan penundaan penggunaan jilbab termuat dalam telegram rahasia (TR) bertanggal 28 November 2013, yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Oegroseno. Telegram rahasia itu berisi enam imbauan kepada polwan untuk menunda penggunaan jilbab ketika berdinis hingga parlemen menyepakati anggaran penyediaan jilbab. Alasan lainnya, penundaan hingga terbit aturan penggunaan jilbab.

Melalui paragraf tersebut, wartawan menjelaskan secara detail dikeluarkannya telegram rahasia, dari tanggal terbit, siapa yang menandatangani, inti pokok isi tersebut, hingga berlakunya

kembali izin penggunaan jilbab. Republika ingin memberi informasi kepada publik mengenai seluk beluk telegram rahasia, disertai tanggal yang memberi kesan bahwa Polri hanya sekejap dalam mengizinkan polwan berjilbab. Serta alasan penundaan yang tidak sesuai dengan pernyataan Sutarman saat mengizinkan jilbab, yakni polwan leluasa berjilbab tanpa menunggu perkap terbit, namun kini polwan harus menunggu peraturan resmi yang mengatur jilbab polwan agar dapat menutup aurat.

c.3. Maksud

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Ronny F Sompie mengatakan, ada beberapa hal yang perlu diluruskan dari penggunaan jilbab oleh polwan di seluruh polda. Mayoritas penggunaan jilbab tampak kurang beraturan.

Maksud dari penundaan jilbab oleh Polri dijelaskan Sompie, yakni ada beberapa hal yang harus diluruskan dari jilbab polwan. Mayoritas polwan menggunakan jilbab dengan warna yang tidak kompak. Penundaan jilbab diumumkan untuk mengatur kembali warna, model, dan tata cara penggunaan, selain itu menunggu dana penyediaan jilbab disetujui parlemen.

c.4. Pra anggapan

Kemarin, Sutarman menyatakan, para polwan tidak menanggapi restu penggunaan jilbab dengan baik. Banyak polwan yang mengenakan jilbab warna-warni ketika bertugas. “Warnanya *enggak karuan*. Merah, kuning, nanti disangka berafiliasi ke parpol.”

Pernyataan Sutarman belum terbukti kebenarannya dan belum tentu warna jilbab berhubungan dengan partai politik, karena masing-masing warna memiliki arti sendiri. Tetapi, pendapat Sutarman bisa jadi sebagai antisipasi jelang pemilu 2014, agar tidak terlihat memihak salah satu parpol yang ikut andil dalam agenda rutin per lima tahun sekali tersebut. Kalimat langsung pada paragraf tersebut seolah mencerminkan bahwa Polri merupakan lembaga netral atau tidak memihak partai politik.

d. Sintaksis

d.1. Kata Ganti

Said menyatakan, dia tidak bisa memaksakan apa yang telah menjadi aturan main di instansi itu. Karena itu, dia berharap Kapolri segera menerbitkan peraturan penggunaan jilbab.

Wartawan menggunakan kata ganti dia. Kata ganti dia digunakan untuk menunjukkan orang ketiga tunggal yang dibicarakan. Dia dalam kalimat tersebut adalah Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj. Wartawan terkesan menunjukkan hanya Said yang bersikap tidak memaksakan atau mendesak agar merubah peraturan polri dalam menunda penggunaan jilbab, namun tetap mengharapkan terbitnya peraturan jilbab polwan.

d.2. Koherensi

Ronny menyatakan, penundaan ini bukan pelarangan. Namun, dia menambahkan, Polri perlu mengeluarkan kebijakan agar polwan yang mengenakan jilbab tidak menyalahi kebersamaan. “Mohon Pengertian seluruh polwan dan masyarakat terkait ini,” ujar Ronny, Jumat (29/11).

Wartawan Republika menggunakan anak kalimat sebagai penjas kontras, dengan konjungsi namun. Wartawan menjelaskan anak kalimat, yakni penggunaan jilbab polwan selama ini, menurut Sompie, menyalahi kekompakkan berseragam, sehingga perlu adanya kebijakan untuk mengatur jilbab polwan. Tujuannya agar seragam polwan terlihat kompak.

d.3. Bentuk Kalimat

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menunjukkan sikap ganjil dalam pemberian izin bagi polisi wanita (polwan) untuk berjilbab. Polri meminta polwan menunda penggunaan jilbab hingga ada aturan resmi dan parlemen menyetujui alokasi anggaran penyediaan busana tersebut.

Pada struktur kalimat aktif, seolah Republika ingin menekankan bahwa Polri yang menunjukkan sikap ganjil. Fokus berita terletak pada Polri yang memberikan kebijakan penundaan penggunaan jilbab polwan. Penundaan pemakaian jilbab berlaku hingga terbit peraturan resmi dan anggaran penyediaan jilbab disetujui oleh parlemen. Republika menuliskan penundaan tersebut karena teknis belum adanya peraturan resmi yang mengatur warna, model, dan tata cara penggunaan jilbab polwan.

e. Stilistik

Menurut dia, kebijakan ini merusak sukacita polwan yang bisa menggunakan jilbab ketika bertugas.

Wartawan Republika memilih kata merusak sukacita dalam kalimat tersebut. Kata lain yang dapat digunakan adalah kebijakan penundaan jilbab mengecewakan, menggagalkan, atau mengabaikan

kegembiraan polwan. Penggunaan kata merusak suka cita, oleh Republika bukan tanpa alasan, kata tersebut terkesan lebih halus, karena alasan penundaan jilbab tidak sepenuhnya disebabkan Polri.

f. Retoris

f.1. Grafis

Pada berita ini, Republika menampilkan gambar polwan yang memakai jilbab dengan *caption*: polisi wanita (polwan) dari berbagai kesatuan di lingkungan Polda Metro Jaya berbasis dalam sebuah acara, pekan lalu. Foto tersebut tidak mencerminkan judul berita Jilbab Polwan Ditunda. Penampilan foto tersebut seolah menunjukkan bahwa polwan yang berjilbab seperti pada gambar tidak dapat dilihat lagi karena perizinan penggunaan jilbab ditunda. Lihat gambar berikut:



● Polisi wanita (polwan) dari berbagai kesatuan di lingkungan Polda Metro Jaya berbaris dalam sebuah acara, pekan lalu.

Penekanan lain terlihat pada judul berita yang ditulis cetak tebal dengan ukuran besar, dengan jenis huruf sans serif atau tanpa kait. Sans serif adalah jenis huruf yang tidak memiliki garis-garis kecil, bersifat solid, dan lebih tegas. Republika

menggunakan jenis tersebut agar judul berita dapat terbaca jelas, sehingga menarik pembaca. Selain itu terdapat *angle* berita dengan penulisan cetak tebal dan digaris bawah. *Angle* dapat digunakan wartawan untuk mengarahkan opini publik. Penekanan itu semua memperlihatkan bahwa Republika tertarik dan memberikan perhatian lebih pada pemberitaan penundaan jilbab.

Lihat gambar berikut:



f.2. Metafora

Pimpinan Pondok Pesantren Daarul Qur'an Ustaz Yusuf Mansur mengatakan, kepolisian sebaiknya tetap mengizinkan penggunaan jilbab. Peraturan Polri seharusnya tidak mengalahkan aturan Allah.

Kalimat "Peraturan Polri seharusnya tidak mengalahkan aturan Allah" memiliki maksud, menutup aurat merupakan perintah wajib dari Allah bagi perempuan Muslim, salah satunya dengan menggunakan jilbab. Kebijakan penundaan penggunaan jilbab yang dikeluarkan Polri, putusan tersebut terkesan mengungguli perintah Allah, Pencipta manusia. Pemunculan pendapat Ustaz Yusuf Mansur oleh wartawan bertujuan untuk mempertegas perintah Allah, dengan memilih ustaz sebagai pihak yang berkompeten mengomentari permasalahan agama.

f.3. Ekspresi

Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) Hamidah Abdurahman menyayangkan sikap tidak konsisten Polri. Menurut dia, kebijakan ini merusak sukacita polwan yang bisa menggunakan jilbab ketika bertugas. “Ini sangat mengecewakan.”

Paragraf tersebut menggambarkan sikap kecewa atau kontra dari salah seorang anggota internal kepolisian terhadap kebijakan polri yang menunda perizinan jilbab polwan.

Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj memahami penundaan karena menyangkut teknis model dan warna jilbab. Said menyatakan, dia tidak bisa memaksakan apa yang telah menjadi aturan main di instansi itu. Karena itu, dia berharap Kapolri segera menerbitkan peraturan penggunaan jilbab.

Selain menampilkan kutipan pendapat narasumber yang bersikap kontra, wartawan Republika juga memuat pernyataan netral dari Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj. Said tidak menyalahkan kebijakan penundaan jilbab, ia berusaha memahami pilihan Polri, dengan harapan segera terbit peraturan yang menjamin terlaksananya perizinan jilbab. Wartawan Republika berusaha menyajikan berita berimbang melalui pemuatan kutipan narasumber yang bersikap pro, kontra, ataupun tidak memihak.

4.1.6. Berita tanggal 10 Desember 2013 berjudul Kapolri harus Revisi

Telegram Rahasia

a. Tematik

Polemik penundaan jilbab polwan harus segera diakhiri. Oleh karena itu, DPR meminta Polri untuk merevisi telegram rahasia (TR) penundaan jilbab polwan.

Republika terkesan membuka wacana untuk segera mengakhiri polemik penundaan jilbab polwan. Dilanjutkan dengan pendapat DPR untuk memperkuat wacana Republika. DPR meminta Polri untuk mengoreksi telegram rahasia tentang penundaan jilbab. Perjuangan polwan untuk dapat berjilbab terlihat tidak mulus, padahal menutup aurat merupakan perintah agama dan negara menjamin hak tersebut. Republika seolah mengharap agar permasalahan jilbab polwan tidak berlarut, karena dasar penggunaan jilbab sudah dijelaskan dalam Al quran surat Al ahzab ayat 59 dan konstitusi pasal 29 ayat 2.

b. Skematik

Berita diawali penegasan polemik penundaan jilbab yang harus diakhiri. Selanjutnya Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Al Muzzamil, mengharuskan Polri merevisi telegram rahasia. Menurutnya, alasan penundaan jilbab tidak didasarkan pada alasan kuat. Pada pertengahan berita wartawan Republika menjelaskan agenda rapat dengar pendapat antara Polri dan Komisi III DPR, namun tertunda.

Paragraf selanjutnya, anggota DPR dari Partai Golkar Yoris Raweyai, mengatakan sebenarnya Polri sudah membolehkan polwan berjilbab, hanya tinggal menunggu SK, sehingga tidak lagi ada masalah mengenai jilbab. Selanjutnya wartawan Republika mebiaskan pernyataan tersebut dengan pendapat anggota Komisi III DPR dari partai Gerindra Martin Hutabarat, menurutnya pertemuan dengan kapolri penting untuk membahas sejumlah masalah jilbab. Anggota

Komisi III DPR RI Sarifuddin Sudding, juga menganggap penting pertemuan tersebut untuk mendapatkan kejelasan maksud dan tujuan polri menunda penggunaan jilbab. Pada akhir berita, wartawan kembali menuliskan kronologi perizinan dan penudaan jilbab polwan.

Narasumber berita yang dipilih Wartawan Republika semuanya berasal dari anggota Komisi III DPR. Pemilihan tersebut dimaksudkan agar orang yang mengomentari telegram rahasia memiliki kapasitas terhadap permasalahan, karena komisi tersebut memiliki ruang lingkup kebijakan mengenai permasalahan hak asasi manusia, termasuk hak berjilbab. Republika terkesan ikut mengharuskan telegram rahasia direvisi, terlihat dari pendapat narasumber yang dituliskan kebanyakan memiliki sikap pro terhadap wacana perevisian telegram dan menyetujui adanya rapat dengar pendapat. Pertengahan berita terdapat narasumber yang menganggap sudah tidak ada permasalahan jilbab polwan, tetapi wartawan seolah mematahkan pernyataan itu dengan menampilkan pihak lain yang menganggap masih ada masalah mengenai jilbab polwan.

c. Semantik

c.1. Latar

Menurut Al Muzzammil, pimpinan Polri seharusnya menyadari bahwa selama ini kebijakannya yang tidak membolehkan polwan menggunakan jilbab melanggar HAM dan konstitusi sehingga kebijakan tersebut jangan ditunda-tunda lagi.

Wartawan Republika menuliskan latar perlunya Polri merevisi telegram rahasia karena akan melanggar hak asasi manusia yang telah dijamin negara dalam konstitusi. Pernyataan tersebut seperti menyuguhkan apa saja yang akan dilanggar Polri, sebagai penegak hukum, jika tidak memperbolehkan polwan berjilbab. Melihat hal tersebut, semestinya kebijakan perizinan jilbab tidak lagi ditunda Polri, karena telah ada bukti yang menjamin penggunaan jilbab bagi wanita, termasuk polwan.

c.2. Detil

Rapat dengar pendapat (RDP) antara Polri dan Komisi III DPR membahas jilbab polisi wanita (polwan) sedianya dilaksanakan pada Senin (9/12). Namun, pertemuan tersebut tertunda karena ada sejumlah agenda yang harus dilakukan Kapolri Jenderal Sutarman terkait peringatan hari antikorupsi pada 9 Desember. Dengan demikian, pertemuan kembali dijadwalkan pekan depan.

Wartawan Republika menuliskan secara detil siapa yang ikut dalam RDP, apa tujuannya, waktu dilaksanakannya, alasan tertundanya pertemuan tersebut, dan kapan dijadwalkan lagi. Melalui penjelasan tersebut, tindakan dari berbagai pihak untuk membahas jilbab polwan tertunda terkesan karena kapolri memiliki agenda yang padat, dan lebih mementingkan hal lain.

c.3. Maksud

Al Muzzamil mengatakan, alasan untuk menunda pemakaian jilbab tidak didasarkan pada pertimbangan yang kuat. Dengan demikian, ia meminta polwan tetap menggunakan jilbab sambil menunggu adanya peraturan kapolri (perkap) tentang jilbab polwan.

Paragraf tersebut menjelaskan alasan menunda penggunaan jilbab karena teknis tidak kompaknya jilbab yang digunakan polwan, menurut Yusuf, tidak dilandaskan pada pertimbangan yang kuat. Yusuf meminta polwan tetap menggunakan jilbab sembari menunggu perkap terbit, sehingga tidak perlu ada penundaan pemakaian jilbab, polwan tetap bisa menutup aurat. Republika terkesan setuju dengan pendapat tersebut, dengan meletakkannya pada awal berita.

c.4. Pra anggapan

Menurut Yoris, SK ini nantinya mengatur mengenai bentuk dan warna jilbab. Karena itu, menurutnya, tidak ada lagi masalah mengenai jilbab.

Meski belum terbukti apa saja isi perkap karena masih dirumuskan, menurut Yoris, peraturan tersebut mengatur teknis model dan warna jilbab, sehingga tidak ada lagi permasalahan mengenai jilbab. Padahal perkap belum terbit dan belum ada uji coba penerapan perkap untuk mengetahui bermasalah atau tidak. Penulisan kata “menurutnya” pada tengah kalimat mencerminkan bahwa hanya Yoris yang berpendapat tidak ada lagi masalah mengenai jilbab polwan.

d. Sintaksis

d.1. Kata Ganti

Anggota Komisi III DPR dari Partai Gerindra Martin Hutabarat mengatakan, pertemuan dengan Kapolri penting untuk membahas sejumlah masalah aktual seperti jilbab

polwan. “Kita sayangkan di hari-hari pertama Kapolri bertugas, isu yang mendominasi malahan soal jilbab.”

Republika mengutip langsung pernyataan Anggota Komisi III DPR dari Partai Gerindra. Kata ganti kita memperlihatkan seolah Republika mencoba menjadi bagian Komisi III DPR. Kata ganti kita, berguna menunjuk orang pertama yang berbicara dengan jumlah jamak. Pembaca, wartawan, dan narasumber terkesan tidak memiliki jarak, ikut menjadi bagian. Seolah pembaca dan wartawan turut menyayangkan isu yang mendominasi saat awal kapolri bertugas adalah jilbab polwan.

d.2. Koherensi

Polemik penundaan jilbab polwan harus segera diakhiri. Oleh karena itu, DPR meminta Polri untuk merevisi telegram rahasia (TR) penundaan jilbab polwan.

Koherensi paragraf tersebut adalah akibat, menggunakan kata hubung oleh karena itu, untuk menghubungkan kalimat sebelumnya. Kalimat pertama menjadi sebab, sedangkan kalimat selanjutnya menyatakan akibat. Penekanan diberikan pada anak kalimat bahwa DPR meminta Polri merevisi telegram rahasia. Republika seolah menyatakan polemik jilbab dapat berakhir jika telegram rahasia penundaan jilbab polwan direvisi.

d.3. Bentuk Kalimat

Polemik penundaan jilbab polwan harus segera diakhiri. Oleh karena itu, DPR meminta Polri untuk merevisi telegram rahasia (TR) penundaan jilbab polwan.

Wartawan Republika menggunakan struktur kalimat pasif dalam kata diakhiri. Penekanan dilakukan pada apa yang harus diakhiri, yakni polemik penundaan jilbab. Selanjutnya struktur kalimat aktif digunakan pada kata meminta dan merevisi. Subjek yang ditekankan adalah DPR. Republika ingin menyampaikan, lembaga negara pembuat undang-undang telah memberi penegasan untuk merevisi telegram rahasia.

e. Stilistik

Menurutnya, masih banyak masalah yang harus ditangani Polri. Misalnya, upaya untuk reformasi di kepolisian dalam peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.

Wartawan Republika menggunakan leksikon dengan kata reformasi. Reformasi berarti perbaikan secara drastis untuk kebaikan dalam masyarakat atau negara. Kata lain yang memiliki makna sepadan dengan reformasi adalah perombakan, pembaruan, pembaharuan. Republika menggunakan kata reformasi untuk menunjukkan masa kepemimpinan Sutarman baru saja diawali, sehingga perlu ada pembaruan ke arah baik untuk peningkatan kinerja kepolisian dalam melayani masyarakat.

f. Retoris

f.1. Grafis

Sebab, pada Rabu (19/11), Sutarman telah memberikan izin secara lisan kepada polwan untuk menggunakan jilbab. Namun, pada Jumat (28/11). Wakapolri Komjen Pol Oegroseno mengirimkan telegram rahasia kepada polda se-Indonesia untuk menunda pemakaian jilbab bagi polwan.

Penekanan yang dilakukan Republika mengenai pengulangan kronologi waktu perizinan dan penundaan penggunaan jilbab bagi polwan. Melalui penekanan tersebut, Republika terlihat menganggap ganjil ketidakkonsistenan Polri dalam memberikan perizinan penggunaan jilbab. Seakan-akan Republika ingin menunjukkan jeda antara perizinan dan penundaan penggunaan jilbab yang singkat. Alasan yang digunakan kapolri untuk menunda penggunaan jilbab juga terkesan ganjil, dengan menyebutkan polwan menggunakan jilbab warna-warni tidak serupa seragam polwan Aceh.

f.2. Metafora

Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Sudding akan mengklarifikasi siapa dibalik penundaan jilbab polwan. Upaya ini dilakukan pada saat pertemuan dengan Kapolri Jenderal Polisi Sutarman.

Pada kalimat tersebut, seolah Sarifuddin ikut menjadi anggota Polri dan terlibat dalam permasalahan penundaan jilbab, dengan mengatakan akan mengklarifikasi. Klarifikasi memiliki pengertian menjernihkan, mengembalikan sesuatu kepada yang sebenarnya. Maksud dari Sarifuddin dalam pernyataan tersebut mungkin akan menguak siapa yang mengatur atau memimpin adanya penundaan jilbab polwan.

f.3. Ekspresi

Menurut Yoris, SK ini nantinya mengatur mengenai bentuk dan warna jilbab. Karena itu, menurutnya, tidak ada lagi masalah mengenai jilbab.

Anggota Komisi III DPR dari Partai Gerindra Martin Hutabarat mengatakan, pertemuan dengan Kapolri penting untuk membahas sejumlah masalah aktual seperti jilbab polwan. “Kita sayangkan di hari-hari pertama Kapolri bertugas, isu yang mendominasi malahan soal jilbab,” ujar dia.

Terlihat ekspresi Yoris yang menganggap sudah tidak ada lagi masalah penggunaan jilbab polwan. Seakan ia menganggap tidak perlu lagi pembahasan permasalahan tersebut. Republika membiaskannya dengan pernyataan Hutabarat, yang masih menganggap masalah belum selesai dan perlu penanganan dengan mengadakan pertemuan bersama kapolri. Penyusunan pendapat seperti di atas oleh wartawan, seolah memperlihatkan ekspresi Republika yang menganggap jilbab polwan sebagai permasalahan serius dan segera perlu mendapat penanganan.

4.2. Analisis Kognisi Sosial

Menurut Baron dan Byrne (dalam) kognisi sosial merupakan cara individu untuk menganalisa, mengingat dan menggunakan informasi mengenai kejadian atau peristiwa sosial (Sabiq, diakses 17 Maret 2014). Menurut van Dijk (dalam Eriyanto) analisis kognisi sosial memusatkan perhatian pada struktur mental, proses pemaknaan, dan mental wartawan membantu memahami fenomena tersebut sebagai bagian dari proses produksi berita (Eriyanto, 2001: 267).

Analisis kognisi sosial menekankan bagaimana peristiwa dipahami, didefinisikan, dianalisis, dan ditafsirkan yang ditampilkan dalam suatu skema atau model dan memori. Skema merupakan kerangka atau gambaran untuk

membantu individu mengorganisasikan informasi suatu fenomena yang diperhatikan. Terdapat empat skema, di antaranya skema person, mengenai seseorang memandang orang. Skema diri, mengenai diri sendiri dipandang seseorang. Skema peran, tugas individu dalam masyarakat. Skema peristiwa, mengenai peristiwa sosial yang dialami dapat membantu memahami dan mengingat kejadian. Skema tersebut bekerja aktif mengkonstruksi realitas, apa yang harus wartawan pahami, maknai, dan ingat (Eriyanto, 2001: 262-263).

Analisis Kognisi Sosial Pemberitaan Penggunaan Jilbab

Seorang polwan yang pernah bertugas di Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah sempat meminta bantuan kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) agar dapat menjalankan hak menutup aurat dengan jilbab. Hal tersebut dikerenakan kapolri mengeluarkan edaran bahwa busana kerudung bagi polwan hanya berlaku di daerah Nanggroe Aceh Darussalam. Terdapat pilihan yang diberikan Polri, polwan mengundurkan diri dari jabatan atau melepas jilbab. Sebagai umat mayoritas, umat Islam justru kesulitan menjalankan ajaran agama yang dianut.

Media massa meliput berita mengenai penggunaan jilbab polwan, salah satunya pada Harian Republika. Republika menampilkan komentar masyarakat dan tokoh, umumnya menyatakan keprihatinan terhadap apa yang menimpa polwan Muslim. Komentar tersebut kebanyakan bernada mengecam para pejabat kepolisian yang menghalangi polwan berjilbab. Hal tersebut mengingatkan kembali memori permasalahan jilbab pada tahun 80-an, dalam

pernyataan Peminpin Redaksi Harian Republika, Nasihin Masha (dalam Republika *online*).

“Kita tentu tak menyangkan perkembangan busana Muslimah sudah menjadi gejala nasional dan diterima publik dalam waktu cepat. Padahal pada 1983, pemakaian jilbab masih dilarang di sekolah-sekolah dan di kantor-kantor. Bukan hanya ada larangan, tapi juga teror dari intelijen. Kita masih ingat gosip jilbab beracun. Dirumorkan ada orang-orang berjilbab yang dari balik bajunya yang tertutup rapat membawa cairan beracun dan memasukkannya ke sumur-sumur penduduk. Ada kecemasan dan histeria di masyarakat. Semua teror itu untuk meredam kebangkitan Islam. Busana Muslimah menjadi simbol kebangkitan Islam di Indonesia,” (Masha, diakses 3 Maret 2014).

Permasalahan yang terjadi pada instansi pendidikan, kini dialami polwan Muslim Indonesia. Memori mengenai wacana teror di belakang permasalahan jilbab menjadi pertimbangan wartawan dalam membuat berita jilbab polwan. Bukan tidak beres, Polri terkesan inkonsisten dalam merespon pemakaian jilbab polwan. Dimulai dari perdebatan alot desakan perizinan jilbab polwan dari tahun 2012 saat Timur Pradopo masih menjabat sebagai Kapolri, dan baru diizinkan saat Sutarman menggantikan posisi tersebut. Pemberian izin polwan berjilbab tidak bertahan lama, selang kurang lebih satu bulan, Polri menerbitkan telegram rahasia berisi perintah untuk polwan agar menunda berjilbab.

Ketidakkonsistenan Polri memunculkan wacana wartawan Republika mengenai kelompok antijilbab dalam tubuh kepolisian. Wacana tersebut didasarkan pada alotnya perizinan jilbab polwan yang telah dibantu masyarakat Muslim, dilanjutkan dengan tidak adanya perkap saat Polri memberi izin, hingga terbitnya telegram penundaan jilbab polwan dengan alasan warna yang tidak kompak. Pada berita yang dituliskan wartawan,

seolah mencerminkan bahwa, sebagai penegak hukum, Polri seharusnya telah mengerti hak menjalankan ibadah sesuai agama, yang dijamin dalam konstitusi. Sebagai makhluk sosial yang hidup dengan asas toleransi, setidaknya Polri juga mengetahui perintah ajaran Islam mewajibkan wanita menutup aurat. Hal tersebutlah yang ingin disampaikan wartawan *Republika*, tercermin dari pemilihan narasumber beserta kutipan pendapat yang ditulis.

“Peristiwa yang melatarbelakanginya adalah tentang polwan berjilbab. Isu ini menjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat dan di internal Polri sendiri. Kapolri Jendral Sutarman sempat menuturkan kalau dirinya mendukung polwan berjilbab. Namun belakangan dari Mabes Polri meralat *statement* tersebut dan menganggap belum ada payung hukumnya. Belum lagi dengan isu soal keterbatasan anggaran. Menariknya, isu ini kemudian ditarik lebih luas ke ranah politis di DPR. Sehingga akhirnya isu ini menjadi besar dan menjadi perhatian masyarakat” (Fahmiarto, wawancara pada 3 Juli 2014).

Wartawan *Republika* menjadi media yang secara intens memberitakan perkembangan permasalahan tersebut. Pada proses produksi berita polwan berjilbab, wartawan terlebih dahulu menggali informasi selengkap-lengkapnyanya tentang persoalan tersebut sebelum melakukan wawancara. Hal tersebut penting sebagai sumber referensi dan untuk membentuk *mindset* mengenai persoalan yang berkembang. Setelah itu barulah wartawan menggali akar masalah tersebut dengan mewawancari narasumber yang berkompeten.

“Saat memilih narasumber, memang dibutuhkan sejumlah pertimbangan, yang terpenting adalah kompetensi dan kualifikasi. Narasumber yang dipilih adalah orang yang benar-benar menguasai bidang tersebut, terlibat langsung di dalamnya, dan memahami betul masalahnya. Pada konteks pemberitaan polwan berjilbab, narasumber yang berkompeten menanggapi adalah kalangan pejabat Polri, Polwan, anggota DPR, atau aktivis pergerakan Islam” (Fahmiarto, wawancara pada 3 Juli 2014).

Setelah mengumpulkan berbagai bahan mengenai permasalahan tersebut, wartawan kemudian mengolah dan meramunya menjadi sebuah tulisan yang akan diterbitkan dalam Surat Kabar Harian Republika. Pada bagian tersebut terdapat proses pemilihan diksi, *point of view* atau sudut pandang berita, serta eksplorasi ide, dan pemikiran dalam bentuk tulisan. Sudut pandang berita menjadi hal penting yang harus dilakukan wartawan. Pemilihan yang tepat akan membuat berita yang dihasilkan menjadi enak dan menarik dibaca.

Wartawan harus jeli melihat sisi paling menarik dari isu yang akan dikupasnya untuk menentukan sudut pandang, tidak lupa memperhatikan kedalaman isi juga. Pemilihan sudut pandang yang tepat akan menentukan sampai atau tidaknya pesan kepada pembaca. Kemudian wartawan menuliskan hasil temuan di lapangan menjadi sebuah berita dengan gaya penulisan yang mudah dipahami oleh pembaca. Pada pemberitaan ini, wartawan menggunakan gaya penulisan semi *feature* (baca ficer).

“Gaya penulisannya adalah semi ficer. Artinya ficer murni juga tidak, tapi *hard news* juga tidak sepenuhnya. Ada kombinasi antara gaya ficer dan *hard news*. Gaya penulisan semacam ini menurut saya lebih mengena dan bisa diterima oleh pembaca” (Fahmiarto, wawancara pada 3 Juli 2014).

Pada tahap penyusunan pendapat narasumber, wartawan harus jeli dalam memilah dan memilih pendapat mana yang diletakkan di awal atau akhir berita, sesuai tingkat penting dan menarik suatu informasi.

“Sebelum menulis berita, wartawan harus punya kerangka acuan tentang tulisan tersebut. Ini untuk menjaga agar tulisan tersebut tidak keluar dari konteks dan kemana-mana. Pendapat narasumber yang telah diperolehnya harus disusun berdasarkan kerangka acuan yang

telah dibuat tersebut. Ini tentu dengan memperhatikan aspek penting tidaknya pendapat tersebut ditempatkan di bagian atas, tengah, atau akhir berita” (Fahmiarto, wawancara pada 3 Juli 2014).

Hal tersebut mencerminkan konstruksi wacana yang ingin dibangun dalam pemberitaan polwan berjilbab. Setelah tulisan dari wartawan selesai, kemudian tulisan tersebut diberikan pada editor untuk melalui proses edit agar sesuai standar berita yang layak dan matang saat diterbitkan.

“Ini terkait dengan ejaan, logika berpikir, alur tulisan, dan sebagainya” (Fahmiarto, wawancara pada 3 Juli 2014).

Proses produksi tersebut menjadi hal penting yang perlu diperhatikan dalam analisis kognisi sosial. Pada proses tersebut memperlihatkan konstruksi wacana yang ingin dibangun, latar belakang penulisan berita, dan pada tahap mana kognisi wartawan diperlukan. Pada pemberitaan ini, Republika berusaha membela hak polwan Muslim dan menyajikan data-data yang mendukung jaminan hak untuk menjalankan perintah agama, disertai pendapat narasumber yang berkompeten menanggapi permasalahan polwan berjilbab. Wartawan menyusun pendapat narasumber berita dengan mempertimbangkan aspek penting tidaknya argumen untuk mendukung pemberitaan.

4.2.1. Substansi Berita Belum Mengizinkan Penggunaan Jilbab

Berita berjudul Polwan Minta Izin Berjilbab

Pada berita berjudul Polwan Minta Izin Berjilbab, wartawan Republika menampilkan pendapat narasumber yang tidak menyetujui peraturan instansi kepolisian untuk tidak memperbolehkan penggunaan jilbab bagi polisi wanita (polwan). Porsi banyak diberikan pada Wakil

Sekretaris Jenderal MUI dari awal hingga tengah berita, daripada pemunculan pendapat polwan meminta izin berjilbab yang terletak mendekati akhir berita. Republika ikut tidak setuju terhadap peraturan kepolisian yang tidak memperbolehkan polwan berjilbab saat bertugas.

Tanggapan terhadap berita tersebut termuat dalam tajuk berikut:

“Sudah selayaknya bagi setiap Muslim untuk mematuhi ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari. Baik dalam rumah tangga maupun saat bekerja. Apalagi menutup aurat dengan berjilbab adalah sesuatu yang baik. Undang-undang Dasar (UUD) 1945 menjamin hak bagi setiap warga negara Indonesia untuk menjalankan kewajibannya sebagai umat beragama sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Dalam hal ini, termasuk memakai jilbab,” (Tajuk Republika, edisi 5 Juni 2013).

Pernyataan tersebut diperkuat dengan pemunculan pendapat Zulkarnaen yang menyatakan, seandainya Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melakukan pelarangan pemakaian jilbab, tentu ini telah melanggar UUD 1945. Sengaja atau tidak, wartawan Republika membangun opini publik, jika kepolisian tidak memperbolehkan polwan berjilbab, maka mereka telah melanggar hak menjalankan syariat sesuai kepercayaan dan agama yang dijamin oleh UUD 1945.

Latar belakang berita ini mengenai Polwan Polda Jawa Tengah yang meminta izin berjilbab saat bertugas, tetapi belum mendapat respon positif, bahkan keluar surat edaran yang menegaskan hanya Polwan Polda Aceh yang diperbolehkan berjilbab. Berita tersebut merupakan awal mula muncul pemberitaan penggunaan jilbab bagi polwan, diletakkan pada halaman 26 rubrik khasanah, sebelum nantinya Republika memuat secara intens.

Berita berjudul Pimpinan Polri tak Berhak Larang Polwan Berjilbab

Republika meletakkan berita pada halaman dua rubrik nasional. Halaman dua merupakan kategori *headline* dalam atau berita yang menjadi topik utama di halaman dua dan tiga surat kabar. Peletakan tersebut mencerminkan Republika memberi perhatian lebih dan menganggap berita penting untuk dibaca dan ditindak lanjuti. Mengenai isi berita, wartawan Republika lebih mengarah pada syariat agama Islam. Wartawan Republika memilih narasumber yang sejalan dengan pemikirannya guna mempertegas pendapat yang disampaikan. Pada berita kali ini, wartawan memilih narasumber dari Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Amir Syah, dan meletakkannya pada awal hingga pertengahan berita.

Pada berita tersebut, MUI menegaskan syariat Islam mewajibkan kepada setiap perempuan untuk menutup aurat. Alasan tersebut dijadikan Amir untuk meminta Polri meninjau ulang surat keputusan Kapolri yang melarang penggunaan jilbab polwan. Menurutnya, pimpinan polisi tidak ada hak untuk melarang polwan berjilbab.

Pendapat lain disampaikan Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane. Pane mengkritik sikap Wakapolri Komjen Nanan Sukarna yang memberikan pilihan bagi polwan berjilbab agar meninggalkan statusnya sebagai polisi. Menurutnya, itu bukanlah pernyataan arif dari seorang pemimpin, sangat otoriter. Seharusnya, bisa membuat sejarah baru agar dikenang polwan Muslim dengan mengeluarkan izin polwan

berjilbab. Senada dengan Pane, redaksi Republika berpendapat dalam tajuk yang ditulis jauh hari sebelum berita ini muncul.

“Kita sangat mendorong pimpinan Polri untuk mendorong anggotanya, terutama polisi wanita untuk menggunakan jilbab. Sebab, hal itu sangat positif dan sesuai dengan perintah agama Islam sebagaimana juga dianut oleh Kapolri Timur Pradopo. Alangkah tidak bijaksana dan naif jika kapolri menghalangi dan menolak keinginan anggota polisi wanita yang ingin menggunakan jilbab,” (Tajuk Republika, edisi 5 Juni 2013).

Republika seolah ikut kecewa, menilai orang yang menghalangi polwan berjilbab dengan memberi pilihan untuk pensiun, sebagai tindakan tidak bijaksana. Wartawan Republika dalam tulisan beritanya, mencerminkan harapan agar jilbab segera diperbolehkan bagi polwan, dengan alasan hal tersebut memperbaiki citra kepolisian.

4.2.2. Substansi Berita Mengizinkan Penggunaan Jilbab

Berita berjudul Mulai Hari Ini Polwan Bebas Kenakan Jilbab

Redaksi menjadikan berita berjudul Mulai Hari Ini Polwan Bebas Kenakan Jilbab, sebagai *headline* di halaman muka Surat Kabar Republika. Wartawan menginformasikan keputusan Kapolri yang mengizinkan secara lisan penggunaan jilbab bagi polwan mulai 20 November 2013. Republika lebih menekankan teknis model dan warna jilbab, serta sedikit menyinggung anggaran pengadaan seragam. Redaksi Republika memiliki pendapat mengenai hal tersebut,

“Walau terbilang terlambat, kebijakan ini tetap perlu diapresiasi. Mengingat, sejumlah negara, termasuk negara non-Muslim sekalipun, telah memperbolehkan petugas kepolisian untuk menggunakan jilbab. Namun, kata terlambat masih lebih baik ketimbang tidak sama sekali,” (Tajuk Republika, edisi 20 November 2013).

Pendapat tersebut didasari pada awal munculnya desakan perizinan jilbab sejak pertengahan 2012, dan baru mendapat respon serius setahun kemudian. Wartawan *Republika* seolah mendukung kebijakan Sutarman dan membandingkannya dengan mantan kapolri Timur Pradopo. Sikap tersebut terlihat pada kalimat, meski tak menolak usulan itu, Pradopo tak kunjung mengeluarkan perkap terkait aturan berjilbab; Sutarman juga tak mengeluarkan perkap, tetapi mempersilakan polwan berjilbab. *Republika* seakan berpendapat bahwa kebijakan yang diambil Sutarman memang seharusnya diberikan sejak dahulu, karena menggunakan jilbab merupakan perintah agama dan hak asasi yang dijamin dalam UUD 1945.

“Kini kesempatan sudah terbuka lebar. Pemimpin di lembaga Bhayangkara itu telah mempersilakan anggotanya yang Muslimah untuk menggunakan jilbab dan memakainya saat bertugas sekalipun. Kesempatan baik yang telah diperjuangkan ini hendaknya diambil sesegera mungkin,” (Tajuk *Republika*, edisi 20 November 2013).

Wartawan *Republika* mencari dan menuliskan pendapat narasumber yang senada untuk memperkuat pendapatnya. Seperti menurut Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Awi Setiyono. Setiyono berharap polwan dapat memanfaatkan kesempatan, artinya berjilbab dengan menggunakan rok panjang, celana panjang, dan baju lengan panjang. Wartawan *Republika* seolah menginginkan agar polwan tidak melewatkan kesempatan yang diberikan kapolri. Banyak pihak telah ikut memperjuangkan perizinan penggunaan jilbab bagi

polwan, dengan jangka waktu tidak singkat hingga akhirnya direstui Kapolri Sutarman.

Berita berjudul Kapolri Janji Terbitkan Perkap Jilbab

Berita kembali menjadi *headline* di Surat Kabar Republika. Isi berita mengenai teknis penantian terbitnya peraturan kapolri (perkap) serta masih berpusar pada syarat-syarat jilbab yang digunakan polwan saat bertugas. Republika mengawali berita dengan kalimat, Kapolri Jenderal Sutarman berjanji mengeluarkan peraturan kapolri guna memperkuat aturan perizinan jilbab. Narasumber berita berasal dari anggota Kepolisian Republik Indonesia yang merespons positif kebijakan Sutarman serta mengharap segera ada perkap dari kapolri. Harapan senada disampaikan Republika yang dituliskan dalam tajuk.

“Kita harapkan, kebijakan yang disampaikan Kapolri Sutarman ini, hendaknya bisa segera ditindak lanjuti dengan ditebitkannya Peraturan Kapolri (perkap) mengenai aturan jilbab ini. hal ini sangat penting, mengingat kebijakan yang disampaikan secara lisan terlalu gampang dilupakan. Dan ketika berganti kepemimpinan, maka berganti pula kebijakan,” (Tajuk Republika, edisi 20 November 2013).

Republika menganggap perkap sangat penting untuk memberikan kekuatan hukum bagi aturan penggunaan jilbab. Perkap juga bisa menjadi acuan dan referensi bagi pemimpin Polri berikutnya. Tak kalah penting dari perkap, permasalahan anggaran pengadaan jilbab polwan juga menjadi pembahasan dalam pemberitaan ini. Anggota Komisi III DPR Achmad Yani mendorong agar anggaran penyediaan jilbab bagi polwan segera tersedia.

4.2.3. Substansi Berita Menunda Penggunaan Jilbab

Berita berjudul Jilbab Polwan Ditunda

Berita berjudul Jilbab Polwan Ditunda, mejadi *headline* Surat Kabar Republika. Berita tersebut mengejutkan berbagai kalangan yang ikut memperjuangkan perizinan jilbab bagi polwan. Latar belakang penulisan berita ini mengenai inkonsisten Polri dalam memberikan izin polwan berjilbab. Jilbab sempat tidak diizinkan, namun setelah banyak pihak bertindak akhirnya kapolri memberi izin pemakaian jilbab bagi polwan. Terdapat kebijakan penundaan jilbab yang termuat dalam telegram rahasia, ditanda tangani Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Oegroseno.

Republika mengawali berita dengan kalimat, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menunjukkan sikap ganjil dalam pemberian izin bagi polisi wanita (polwan) untuk berjilbab. Melalui tajuk, Republika menyampaikan kecurigaannya tentang kelompok anti jilbab di internal Polri.

“Kecurigaan akan adanya kelompok ini muncul karena perjuangan umat Islam agar institusi Polri mepersilakan polwan berjilbab mendapatkan halangan yang kuat. Banyak alasan yang disampaikan untuk menghalangi polwan berjilbab. Mulai dari mengganggu gerak polwan di lapangan hingga ketidak kompak di jajaran polri. Padahal polwan di Aceh sudah membuktikan bahwa polwan berjilbab tetap kompak dan tidak mengganggu kegesitan,” (Tajuk Republika, edisi 2 Desember 2013).

Republika berpendapat, bahwa kelompok anti jilbab akan memandang persoalan jilbab tidak sekadar penutup aurat, tetapi

sebagai keberhasilan memasukkan ideologi Islam dalam instansi kepolisian. Pendapat tersebut dikarenakan kebijakan kapolri dalam memberikan izin penggunaan jilbab bagi polwan terkesan tidak konsisten. Disertai alasan penundaan tidak didasari pertimbangan yang kuat, seperti teknis kekompakan seragam dan kegesitan polwan bekerja di lapangan.

Pada akhir pemberitaan, Republika memunculkan pendapat dari anggota kepolisian dan lembaga keislaman yang tidak setuju atas penundaan penggunaan jilbab bagi polwan. Republika terlihat ikut kontra terhadap penundaan tersebut, isi pemberitaan menampilkan kronologi perizinan hingga penundaan jilbab polwan. Republika juga menyajikan kronologi dan pendapat dari anggota kepolisian yang tidak sesuai dengan pernyataan kapolri sebelumnya yang telah mengizinkan penggunaan jilbab.

Berita berjudul Kapolri Harus Revisi Telegram Jilbab

Republika meletakkan berita pada halaman dua rubrik nasional. Narasumber yang ditampilkan dalam berita kebanyakan bersikap kontra terhadap penundaan jilbab polwan, mereka menginginkan pertemuan untuk membahas telegram tersebut. Pada awal berita, Republika menuliskan sikap parlemen melalui wakil ketua komisi III DPR RI, yang meminta Polri merevisi telegram rahasia dan menganggap alasan menunda pemakaian jilbab tidak didasarkan

pertimbangan kuat. Strategi tersebut untuk memperkuat pendapat Republika yang menyatakan

“Alasan teknis penundaan hanya karena alasan keseragam sangatlah tidak rasional. Sebab, jajaran polwan yang ingin berjilbab dipastikan akan rela merogoh kocek pribadi untuk menjaga keyakinan agamanya,” (Tajuk Republika, edisi 2 Desember 2013).

Pada pertengahan berita, wartawan menuliskan pendapat narasumber yang menginginkan dan menganggap penting pertemuan dengan Polri, guna mendapat kejelasan dan tujuan menunda penggunaan jilbab bagi polwan. Republika memiliki pendapat dalam menanggapi permasalahan penundaan jilbab.

“Alasan Polri melakukan penundaan dengan alasan teknis pengadaan jilbab yang belum seragam harus diuji. DPR sebaiknya memasukkan anggaran pengadaan jilbab untuk polwan pada 2014. Jika anggaran sudah disetujui, maka akan bisa dilihat apakah alasan menunda jilbab ini memang persoalan teknis keseragaman atau memang kuatnya kelompok anti jilbab di Polri,” (Tajuk Republika, edisi 2 Desember 2013).

Republika seolah menjadi wadah bagi berbagai orang yang tidak setuju dengan penundaan penggunaan jilbab polwan melalui pemilihan narasumber berita. Republika juga seolah menjadi bagian dari narasumber yang kontra akan hal tersebut, terlihat pada isi tajuk mencerminkan sikap tidak setuju dalam menanggapi persoalan penundaan jilbab.

4.3. Analisis Konteks Sosial

Analisis konteks sosial menjadi dimensi ketiga analisis wacana model van Dijk. Konteks sosial memandang perlunya melakukan analisis

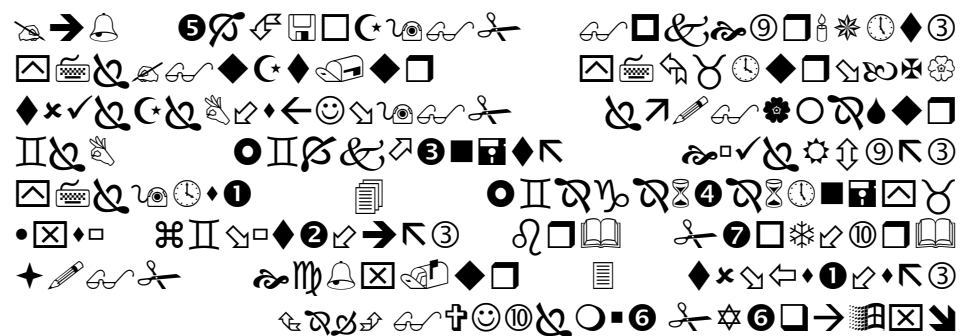
intertekstual dengan meneliti bagaimana wacana diproduksi dan dikonstruksi masyarakat, karena hal tersebut merupakan bagian dari wacana yang berkembang dalam masyarakat. Menurut van Dijk (dalam Eriyanto), terdapat dua poin penting dalam analisis konteks sosial, yaitu kekuasaan dan akses (Eriyanto, 2001: 271).

Van Dijk mengartikan kekuasaan sebagai kepemilikan yang dimiliki suatu kelompok atau anggota untuk mengontrol kelompok dari kelompok lain. Kekuasaan bisa berbentuk langsung dan juga persuasif, seperti tindakan seseorang untuk secara tidak langsung mengontrol dengan jalan mempengaruhi kondisi mental, seperti kepercayaan, sikap, dan pengetahuan. Van Dijk memberi perhatian besar pada akses di antara masing-masing kelompok dalam masyarakat. Kelompok elit akan mempunyai akses lebih besar dibanding kelompok tidak berkuasa. Kelompok elit mempunyai kesempatan lebih besar untuk memiliki akses pada media dan berkesempatan mempengaruhi kesadaran khalayak (Eriyanto, 2001: 272). Berikut analisis konteks sosial pemberitaan penggunaan jilbab bagi polwan:

a. Kekuasaan

Mayoritas masyarakat Indonesia umat Muslim, yang menjunjung nilai keagamaan dalam kehidupan. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya ustaz, ulama, dan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam. Mereka menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat melalui berbagai media, dengan berbagai materi, seperti perintah menutup aurat bagi wanita Muslim, salah satunya dengan jilbab.

Jilbab dalam Islam dipandang masyarakat sebagai pakaian penutup aurat wanita Muslim. Masyarakat memperoleh pengertian tersebut melalui kegiatan komunikasi dengan tokoh agama atau sesama masyarakat, selain itu mereka juga mendapat pengetahuan dari buku, Alquran, dan hadits. Allah memerintahkan perempuan Muslim untuk menutupkan jilbab pada tubuh mereka, sehingga mereka dikenali sebagai perempuan baik-baik dan tidak memancing orang lain untuk menggonggonya (Al-Jamal, 2010: 475). Perintah tersebut telah tertulis dalam surat Al ahzab ayat 59:



Artinya: Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Departemen Agama RI, 1971: 678).

Kewajiban yang harus dijalankan tersebut tidak seluruhnya dapat dilaksanakan oleh wanita Muslim Indonesia. Terdapat permasalahan mengenai penggunaan jilbab pada instansi kepolisian, yakni mengenai desakan perizinan jilbab bagi polwan. Desakan tersebut muncul sejak pertengahan 2012 ketika Jenderal Timur Pradopo masih menjabat sebagai Kapolri. Surat keputusan (SK) Kapolri No Pol: Skep/702/IX/2005 tentang penggunaan pakaian dinas Polri dan Pegawai

Negeri Sipil (PNS) Polri, secara eksplisit tidak tertulis larangan berjilbab. Semua anggota harus mengenakan seragam yang telah ditentukan, tetapi berjilbab tidak terdapat dalam SK tersebut. Secara implisit, berjilbab dilarang bagi anggota polwan selama berada dalam waktu dinas, akan tetapi peraturan tersebut tidak berlaku pada kepolisian daerah Aceh. Sejak 2004 polwan Aceh diperbolehkan berjilbab, karena peraturan daerah mewajibkan wanita menutup aurat.

Perbedaan wilayah penerapan SK Kapolri dinilai telah melanggar hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-undang Dasar (UUD) 1945. “Ini jelas melanggar HAM universal yang diakui dunia dan ditegaskan dalam undang-undang dasar kita,” kata pengajar di Universitas Muhammadiyah Mataram, Ira Mariyah Ulfah (dalam *Republika online*) (Damhuri, diakses 17 Maret 2014). Negara menjamin hak menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan dalam UUD 1945 pasal 29 ayat 2, dan sila pertama pancasila. Banyak kalangan yang memperjuangkan perizinan jilbab bagi polwan, dari masyarakat hingga anggota DPR.

Perjuangan perizinan jilbab mendapat titik terang pada 20 November 2013. Kapolri Jenderal Sutarman memberi izin secara lisan pada polwan untuk berjilbab saat berdinas, syaratnya model dan warna jilbab harus sama dengan polwan Aceh. Polwan juga harus membeli seragam jilbab sendiri karena Polri belum mengalokasikan dana pengadaan seragam tersebut. Keputusan Sutarman mendapat respon

gembira dari berbagai kalangan, tak terkecuali polwan, tetapi kebahagiaan tersebut tidak bertahan lama. Pada 28 November 2013, terbit telegram rahasia yang ditanda tangani Wakapolri Komjen Pol Oegroseno, berisi enam imbauan kepada polwan untuk menunda penggunaan jilbab. Sutarman menyatakan banyak polwan mengenakan jilbab warna-warni ketika bertugas, karena itu ia merasa perlu mengatur dan merumuskan penggunaan jilbab polwan. Selain itu belum ada dana penyediaan seragam jilbab, karena Polri baru mengajukan ke DPR dan rencananya dimasukkan dalam anggaran 2014 (Prambadi, edisi 30 November 2013). Sikap tidak konsisten tersebut mendapat respon negatif dari berbagai kalangan. Terlebih saat Sutarman mengatakan,

“Insya Allah tidak berdosa karena termasuk kita merelakan hak asasi kita ini, karena memproklamirkan diri menjadi anggota Polri.”

Sutarman mengimbau polwan tetap mematuhi peraturan yang ada saat ini, yakni tidak mengenakan jilbab dalam seragam kepolisian. Sutarman juga mengatakan, polwan yang tidak memakai jilbab dalam seragam dinas bukanlah dosa, karena telah memproklamirkan diri sebagai anggota polisi. Pernyataan tersebut mendapat tanggapan dari Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ahmad Cholil Ridwan.

“Kapolri tidak punya kapasitas dalam menyatakan soal berdosa atau tidak berdosa. Kapolri bukan Ulama, kecuali jika pernyataan Kapolri mengutip ulama atau berdasarkan salah satu ayat di Al quran,” ucap Cholil (Hazliansyah, diakses 17 Maret 2014).

Pendapat lain disampaikan pengamat hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Muzaki. Menurutnya,

tidak ada kerugian akibat para polwan menggunakan jilbab. Penelitian menyebutkan kebebasan menjalankan ibadah seperti salat di lingkungan kerja berdampak positif pada kinerja seseorang. Sebaliknya, bila dilarang maka akan menimbulkan produktivitas turun dan terjadi banyak kesalahan dalam bekerja (Iman, diakses 17 Maret 2014).

Pada pemberitaan mengenai penggunaan jilbab bagi polwan, terjadi praktik kekuasaan antara anggota instansi kepolisian yang menjunjung surat keputusan kapolri dan telegram rahasia, dengan umat Muslim Indonesia. Dominasi kekuasaan yang lebih besar dimiliki oleh masyarakat Muslim, karena Indonesia dikenal sebagai negara dengan mayoritas beragama Islam. Karena apabila terdapat seorang Muslim yang mengalami pemasungan hak menjalankan ibadah, pasti umat Muslim lainnya akan membantu menegakkan kebenaran. Melalui penjelasan di atas, terlihat wacana yang berkembang dan berpengaruh dalam masyarakat, terlebih jika menyangkut kepentingannya. Wacana tersebut dijadikan wartawan untuk menyusun berita yang ditulis. Masyarakat tetap menginginkan kapori mengizinkan penggunaan jilbab bagi polwan dan tidak perlu adanya penundaan lagi. Menutup aurat merupakan kewajiban bagi umat Muslim dan bagian dari hak yang dijamin UUD 1945, selain itu berjilbab memiliki banyak manfaat daripada keburukan.

b. Akses

Berita tidak muncul dengan sendirinya, terdapat sebuah proses yang melibatkan pemikiran wartawan dan bahkan kepentingan media,

sehingga wartawan tidak bisa menyuguhkan berita tanpa memerhatikan ideologi media. Pada pemberitaan penggunaan jilbab bagi polwan, Republika menampilkan pihak dominan, yakni umat Muslim yang menginginkan kapolri mengizinkan polwan berjilbab. Pihak yang mendominasi kekuasaan memiliki akses lebih besar pada media, seperti Surat Kabar Republika. Hal tersebut tidak terlepas dari ideologi Republika yang bercirikan keislaman.

Pemberitaan yang dituliskan wartawan kebanyakan memilih narasumber pro terhadap perizinan penggunaan jilbab polwan dan tidak menginginkan adanya penundaan. Republika seolah menghardik dan membangun citra negatif kepolisian dengan menuliskan pendapat narasumber yang menyatakan, seandainya Polri melakukan pelarangan pemakaian jilbab, tentu ini akan melanggar konstitusi. Ditambah dengan dugaan tindak pelecehan oleh atasan Polri terhadap polwan, penyalahgunaan dana pengadaan simulator surat izin mengemudi oleh anggotanya yang ramai diperbincangkan media massa.